

**IMPLEMENTASI ANGGARAN DANA DESA
TERHADAP PENGEMBANGAN MASYARAKAT
DI DESA LEDONG TIMUR KECAMATAN
AEK LEDONG KABUPATEN ASAHAN**

SKRIPSI

Oleh :

AHMAD MAHERDIKA HSB

NPM 1403090020

Program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Lengkap : AHMAD MAHERDIKA HSB
N P M : 1403090020
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI ANGGARAN DANA DESA TERHADAP PENGEMBANGAN MASYARAKAT DI DESA LEDONG TIMUR KECAMATAN AEK LEDONG KABUPATEN ASAHAN

Medan, 26 November 2018

Pembimbing

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi

H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP

Dekan,



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : AHMAD MAHERDIKA HSB

N P M : 1403090020

Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial

Pada hari, tanggal : RABU, 17 OKTOBER 2018

W a k t u : Pukul 08.00 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Drs. EFENDI AUGUS, M.Si

PENGUJI II : H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP

PENGUJI III : Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

PANITIA UJIAN

Ketua,


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP



Sekretaris,


Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, AHMAD MAHERDIKA HSB, NPM : 1403090020,
menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan, memplagiat atau menjiplak serta mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat serta karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan sayajuga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan ini saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.



Medan, Oktober 2018

Ahmad
AHMAD MAHERDIKA HSB



Unggul, Cerdas & Terpercaya
Menjawab surat ini agar disebutkan
tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Ahmad Mulherdika Haribuan
N P M : 1403090020
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Judul Skripsi : Implementasi Anggaran Dana Desa terhadap Penguatan masyarakat di Desa Ledang Timur Kecamatan Aek Ledang Kabupaten Asahan

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	17/04/2018	Bimbingan proposal skripsi	AP
2.	24/04/2018	Bimbingan dan Revisi / Acc Seminar proposal	AP
3.	17/07/2018	Bimbingan dan Revisi pasca seminar proposal	AP
4.	18/07/2018	Bimbingan dan ACC Daftar wawancara	AP
5.	04/10/2018	Bimbingan dan Revisi skripsi (Bab 4 dan Bab 5) + ABSTRAK	AP
6.	5/10/2018	Bimbingan dan Revisi skripsi (Bab 4 dan Bab 5) + ABSTRAK	AP
7.	8/10/2018	Bimbingan, Revisi Bab 5 + ABSTRAK + COVER	AP
8.	9/10/2018	Revisi cover + Bab 5	AP
9.	09/10/18	Acc Solah Muzahid	AP

Medan, 9 - October - 2018

Dekan,

(Dr. Anwar Saleh, S.Sos, M.P.)

Ketua Program Studi,

(H. Mursid bin S.Sos, M.P.)

Pembimbing ke :

(Dr. Anwar Saleh, S.Sos, M.P.)

**IMPLEMENTASI ANGGARAN DANA DESA TERHADAP
PENGEMBANGAN MASYARAKAT DI DESA LEDONG TIMUR
KECAMATAN AEK LEDONG KABUPATEN ASAHAN**

ABSTRAK

Oleh:

AHMAD MAHERDIKA HASIBUAN

1403090020

Implementasi Anggaran Dana Desa memegang peranan penting dalam proses pembangunan suatu Desa baik pembangunan Infrastruktur maupun pembangunan masyarakat. Anggaran Dana Desa merupakan bagian yang tersinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah guna mempercepat proses pembangunan nasional sehingga tidak ada lagi kesenjangan antara pembangunan kota dengan desa. Implementasi Anggaran Dana Desa terhadap Pengembangan Masyarakat diharapkan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat guna memperbaiki taraf kesejahteraan hidupnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan atau Implementasi Anggaran Dana Desa terhadap Pengembangan masyarakat di Desa Ledong Timur Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Landasan teori yang digunakan adalah teori tentang Desa dan Pengembangan Masyarakat. Sumber data Penelitian ini diperoleh dari 10 Narasumber yang terdiri dari Perangkat Desa dan Masyarakat Desa. Hasil penelitian di Desa Ledong Timur Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan bahwa proses Implementasi Anggaran Dana Desa sudah dijalankan sesuai dengan prosedur. Hal ini dibuktikan bahwa telah terealisasi pembangunan infrastruktur desa dan program pengembangan masyarakat di Desa Ledong Timur sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, adapun yang menjadi hambatan Proses Implementasi adalah tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dikarenakan kurangnya sosialisasi Pemerintah Desa Ledong Timur dalam setiap program yang akan dilaksanakan.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Alokasi Anggaran Dana Desa, Pengembangan Masyarakat

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang memberikan taufik dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tidak lupa pula penulis mengucapkan Shalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wasallam, yang telah membawa risalah-Nya kepada seluruh umat manusia.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna untuk memperoleh gelar sarjana (S.Sos) Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berisikan hasil penelitian penulis yang berjudul "Implementasi Anggaran Dana Desa terhadap Pengembangan Masyarakat di Desa Ledong Timur Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan".

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, penulis berusaha seoptimal mungkin untuk menyelesaikannya. Namun penulis menyadari masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca.

Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mendapatkan motivasi, masukan dan nasihat khususnya dari kedua orangtua penulis yaitu Ayahanda Ahmad Syahrudin Hasibuan dan Ibunda Herlina Tambunan yang telah memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil sampai detik ini, dan juga membesarkan penulis yang tidak pernah kenal lelah sehingga penulis

mendapatkan gelar sarjana. Pada kesempatan ini juga dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Agussani, M AP Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Dr. Arifin Saleh Siregar, S.Sos, M.SP. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang juga selaku pembimbing meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta pengarah kepada penulis selama penulisan skripsi ini
3. Bapak Drs. Zulfahmi, M Ikom. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Abrar Adhani, S.Sos, M.SP. Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak H. Mujahiddin, S.Sos, M.SP. Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Ibu Sumiyati Selaku Pelaksana Tugas Kepala Desa Ledong Timur yang telah mengizinkan penulis untuk penelitian di Desa tersebut.
8. Kepada adik adikku tersayang Tila Novanda Hasibuan dan Ahmad Yuska Al Firdaus Hasibuan

9. Teman teman seperjuangan Ilmu Kesejahteraan Sosial 2014 Pagi, Faizul Hamdi Hasibuan S.Sos, Muhammad Nazri Manday S.Sos, Novita Fawali S.Sos, Asnawi Ahmad, Ahmad Maulana Siregar, Taufik Lubis, Dede Kurniawan Sufi, Riswansyah, Irvan Suhandi, Ricky Yulianto, Dedyanto, Riswandi Hutasuhut, Fahri Hidayah, Wulan Dewi Sawitri, Ayuning Tyas Sugita, Dyah Kirana Sekar Ayu, Akhyaruddin Purba, serta Maulia Khairi yang telah memberikan bantuan, dukungan dan semangat kepada Penulis.

Atas segala bantuan dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya, penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan sebesar besarnya, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan karunianya serta membalas segala budi baik yang diberikan kepada penulis. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk seluruh pihak.

Medan, Oktober 2018

Ahmad Maherdika Hasibuan

DAFTAR ISI

	Halamaan
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II URAIAN TEORITIS	7
A. Implementasi.....	7
1. Definisi Implementasi.....	7
2. Implementasi Kebijakan.....	8
3. Hakikat Implementasi.....	9
4. Analisis Pola Implementasi Kebijakan.....	9
5. Pendekatan Implementasi.....	10
B. Desa.....	12
1. Pengertian Desa.....	12
2. Pengertian Alokasi Dana Desa.....	13
3. Pengalokasian Anggaran Dana Desa.....	13

C. Pengembangan Masyarakat.....	17
1. Pengertian Pengembangan Masyarakat.....	17
2. Prinsip Pengembangan Masyarakat.....	18
3. Manajamen Pengembangan Masyarakat.....	22
4. Strategi Pengembangan Masyarakat,,,,,, ,	25
5. Fungsi Strategis Pengembangan Masyarakat.....	26
6. Unsur Pengembangan Masyarakat.....	27
7. Tujuan Pengembangan Masyarakat.....	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Kerangka Konsep.....	33
C. Definisi Konsep.....	34
D. Kategorisasi.....	35
E. Informan atau Narasumber.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
G. Teknik Analisis Data.....	37
H. Lokasi Penelitian.....	39
I. Gambaran Umum Desa Ledong Timur.....	39
1. Sejarah Desa.....	39
2. Demografi Desa.....	40
3. Visi dan Misi Desa Ledong Timur.....	42
4. Pembagian Tugas dan Fungsi.....	43
5. Program Kerja Pengembangan Masyarakat.....	48
6. Struktur Organisasi Desa Ledong Timur.....	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Penyajian	52
B. Hasil Penelitian.....	52
C. Pembahasan.....	76
BAB V PENUTUP.....	80
A. Simpulan.....	80
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
DAFTAR WAWANCARA	
LAMPIRAN LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka Konsep.....	33
Gambar 3.2 Teknik Analisis Data.....	38
Gambar 3.3 Struktur Organisasi.....	51

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Kategorisasi.....	35
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa.....	40
Tabel 3.3 Program Kerja Pengembangan Masyarakat Tahun 2018.....	48
Tabel 3.4 Program Kerja Pengembangan Masyarakat Tahun 2017.....	49
Tabel 3.5 Program Kerja Pengembangan Masyarakat Tahun 2016.....	50
Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin.....	53
Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	53
Tabel 4.3 Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Dalam struktur pemerintahan, Desa menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada ditengah masyarakat. Karenanya dapat di pastikan apapun bentuk setiap program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke Desa.

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian, lahirilah Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan dan kepercayaan pada pemerintahan Desa untuk melaksanakan pembangunan. Selain itu, UU Desa sekaligus merupakan penegasan bahwa Desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. UU Desa membawa misi utama bahwa Negara wajib melindungi dan memberdayakan Desa agar

menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan.

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan Desa itu, maka berbagai rencana dan program-program pembangunan dan pengembangan telah dibuat dan diimplementasikan di Desa, salah satunya kebijakan Alokasi Anggaran Dana Desa (ADD). Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 96 menyebutkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan Anggaran Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran. ADD yang berasal dari APBD kabupaten/kota tersebut bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk Desa paling sedikit 10% setelah dikurangi belanja pegawai.

Melalui Alokasi Anggaran Dana Desa, diharapkan Desa akan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan Pengembangan masyarakat.

Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga dibutuhkan suatu pola pengelolaan pembangunan. Pola tersebut dimaksudkan agar hasil pembangunan dan program-program pemerintahan dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu hal yang dibutuhkan adalah partisipasi masyarakat Desa serta kesadaran masyarakat untuk aktif dalam menunjang pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Adanya

partisipasi masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah dalam pencapaian pelaksanaan program pembangunan tersebut.

Kabupaten Asahan yang merupakan salah satu kabupaten kawasan pantai Timur wilayah Provinsi Sumatera Utara, dengan ibu kota Kisaran yang mempunyai wilayah seluas 3.675 km², Penduduk 706.283 jiwa dan berada pada ketinggian 0-1000 mdpl. Kabupaten Asahan yang terdiri dari 25 Kecamatan, 237 Desa/kelurahan definitif turut serta mengimplementasikan program pemerintah tersebut. Adapun keadaan yang terjadi di Desa Ledong Timur Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan saat ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pengembangan di Desa masih minim, yang juga disebabkan sosialisasi Pemerintah Desa kurang menyentuh seluruh lapisan masyarakat Desa Ledong Timur. Indikasi hal ini terlihat dalam implementasi kebijakan Anggaran Dana Desa mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan hampir seluruhnya dikerjakan oleh pemerintah Desa secara sepihak. Masyarakat Desa yang seharusnya bertindak sebagai penentu arah pembangunan Desa cenderung hanya sebagai penonton dalam setiap program pembangunan dan Pengembangan. Hal ini tentunya disebabkan oleh berbagai hal, seperti minimnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat akan perubahan yang terjadi di Desa.

Kendatipun demikian, masih banyak kelemahan yang muncul ketika dana ini dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan masyarakat Desa dan pembangunan Desa. Kelemahan itu akan menimbulkan persoalan seperti

penyelewengan dana sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran sebagaimana diharapkan sebelumnya. Hal ini dikarenakan oleh ketidakmampuan para aktor pengelola dana yang melibatkan aparat Desa yang faktanya belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola dana itu. Kondisi inilah yang menyebabkan banyak program Pengembangan oleh pemerintah gagal dalam implementasinya.

Adapun kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Ledong Timur Kecamatan Aek Ledong yang merupakan salah satu Desa yang terdapat di Kabupaten Asahan Berdasarkan Peraturan Desa Ledong Timur Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ledong Timur, sebesar Rp. 794.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta rupiah) yang berupa Anggaran Dana Desa dan Dana Desa. Anggaran Dana Desa diprioritaskan untuk bidang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan Pengembangan masyarakat. Sedangkan Dana Desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan Desa, pembangunan kantor dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan **judul “Implementasi Anggaran Dana Desa Terhadap Pengembangan Masyarakat Di Desa Ledong Timur Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut : Bagaimana Implementasi Anggaran Dana Desa terhadap pengembangan masyarakat di Desa Ledong Timur Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui penerapan alokasi anggaran dana Desa terhadap pengembangan masyarakat di Desa Ledong Timur Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait pengembangan masyarakat Desa.
- b. Secara praktis, hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini dapat menjadi suatu bahan masukan bagi Pemerintahan Desa Ledong Timur dalam melaksanakan program pengembangan masyarakat dalam pemanfaatan alokasi anggaran dana Desa.

D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada Bab ini menjelaskan tentang Pengertian Implementasi, Pengertian Implementasi Kebijakan, Pengertian Desa, Pengertian Dana Desa/Alokasi Dana Desa, Pengertian Pengembangan Masyarakat, Prinsip Pengembangan Masyarakat, Tujuan Pengembangan Masyarakat, Pengertian Partisipasi, Pengertian Sumber Daya Manusia.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Informan atau Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan yang diperoleh dari lapangan sehingga peneliti dapat dengan mudah untuk mencari tahu permasalahan yang diteliti.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menerangkan tentang Kesimpulan dan Saran dari semua hasil yang diteliti

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Implementasi

1. Definisi Implementasi

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, Anggara (2014:232), *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan, (Anggara,2014:232),

Adapun pendapat lain tentang Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. (Nurdin, 2002 : 70)

Sedangkan Nugroho (2004:163) Implementasi menggambarkan pelaksanaan kebijakan dalam konteks manajemen berada didalam kerangka organizing-leading-controlling. Jadi ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut.

Menurut Guntur Setiawan (2004: 39) Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan.

2. Implementasi Kebijakan.

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan.

Agustino, (2016 : 128) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

3. Hakikat Implementasi Kebijakan.

Hakikat utama implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier (Agustino, 2016:128) adalah memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat.

4. Analisis Pola Implementasi Kebijakan.

Ada dua konsep dasar berkenaan dengan implementasi kebijakan. Pertama, konsep tentang peralatan kebijakan (policy instrument). Peralatan kebijakan adalah cara yang dipakai dalam menerapkan kebijakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan atau yang ingin dicapai. Kedua, konsep tentang kewenangan yang tersedia untuk melaksanakan implementasi. Kewenangan adalah kekuasaan tertentu yang dimiliki dan secara formal diakui oleh pihak-pihak lain untuk menggunakan peralatan yang tersedia dalam mengimplementasikan kebijakan. Kewenangan berkaitan dengan posisi organisasi yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Disamping kedua konsep tersebut, dilapangan kita menjumpai beberapa faktor yang dapat dikelompokkan sebagai faktor teknis, faktor administratif, dan hubungan kerja antar organisasi atau antar instansi Levitt dalam (Abidin, 2012 : 154). Faktor teknis itu antara lain berkenaan dengan:

1. Kondisi teknis dari permasalahan yang dihadapi. Misalnya pencemaran udara yang disebabkan oleh limbah kimia pabrik.

2. Intensitas tingkat keparahan permasalahan, yang menunjukkan tingkat bahaya atau risiko yang ditimbulkan oleh suatu masalah, apakah suatu masalah masih berada dibawah ambang batas atau sudah melampauinya.
3. Tingkat penguasaan teknologi yang tersedia untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Faktor administratif meliputi aspek-aspek administratif dari hal-hal yang berkaitan dengan konsep-konsep tersebut, antara lain :

1. Status kebijakan.
2. Peralatan kebijakan.
3. Sistem administrasi dan lingkungan kerja yang ada.
4. Jangka waktu yang ditentukan dan yang diperlukan.

Sementara itu, hubungan kerja antar instansi yang terkait, antara lain mencakup :

1. Kepentingan dari pihak-pihak yang terkait.
2. Peran dan kekuasaan yang ada pada masing-masing instansi.
3. Teknik komunikasi yang dipakai.

5. Pendekatan Implementasi.

Menurut Abidin (2012 : 155) Proses implementasi pada umumnya cenderung mengarah pada pendekatan yang bersifat sentralistis atau dari atas kebawah. Apa yang di implementasikan adalah apa yang telah diputuskan. Namun dalam masyarakat yang demokratis, seperti yang telah diungkapkan peranan

rakyat sebagai pemiliki Negara selalu harus diindahkan. Sehubungan dengan kecenderungan dari implementasi yang bersifat sentralistis dan prinsip demokrasi, implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat pendekatan sebagai berikut :

1. Pendekatan struktural.

Pendekatan ini melihat peran institusi atau organisasi sebagai sesuatu yang sangat menentukan. Oleh sebab itu, proses perumusan kebijakan perlu dilakukan bersama dengan proses penataan institusi.

2. Pendekatan prosedural dan manajerial.

Pendekatan ini melihat implementasi dalam bentuk langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan. Pandangan ini lebih bersifat teknis. Implementasi tidak lain daripada langkah-langkah yang biasa dikenal dalam konsep planning, evaluation, dan review technique (PERT). Sesuai dengan pengertian prosedural, yang penting dalam proses implementasi adalah tata urutan, baik dalam pengertian prioritas berdasarkan signifikansi maupun prioritas menurut waktu.

3. Pendekatan Kejiwaan.

Pendekatan ini berhubungan dengan penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu kebijakan. Pengaruh faktor kejiwaan dalam suatu kebijakan sering kali sangat penting, bahkan lebih penting dari substansi yang terkandung dalam kebijakan.

4. Pendekatan politik.

Dilihat dari pandangan ini, implementasi kebijakan tidak dilepaskan dari politik, baik dalam pengertian umum sebagai pencerminan dari persaingan antar kekuatan politik dalam masyarakat, maupun dalam pengertian politik sebagai kekuatan dan pengaruh dalam organisasi atau antar instansi, yang dapat disebut sebagai politik dalam birokrasi. Persoalannya disini menyangkut kepentingan, kekuasaan, dan kecenderungan dari organisasi atau unit-unit dalam sebuah organisasi. Menurut Hogwood and Gunn, keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan dari kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat atau dalam organisasi. Hogwood and Gunn dalam (Abidin, 2012 : 157).

B. Desa

1. Pengertian Desa

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pengertian Anggaran/Alokasi Dana Desa

Dalam Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimaksud dengan :

1. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan dan Pengembangan masyarakat.
2. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.

3. Pengalokasian Anggaran Dana Desa

Berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 Pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang wajib mengalokasikan ADD dalam APBD kabupaten/kota setiap tahun anggaran. Alokasi dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus dibagikan secara proporsional ke setiap Desa. Perhitungan besaran anggaran ADD yang harus dialokasikan daerah

$$\text{ADD} = 10\% \times \text{DBH Pajak dan Retribusi} + \text{DAU} - \text{Belanja Pegawai}$$

untuk diteruskan ke rekening Desa juga diatur (dalam PP No.72 Tahun 2005) dengan formula berikut :

Pengaturan mengenai ADD dalam PP No. 72 Tahun 2005 ini kemudian diatur lebih detail lagi dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Permendagri tersebut dijelaskan mengenai tujuan ADD, tata cara pernghitungan besaran anggaran perDesa, mekanisme penyaluran, penggunaan dana sampai pertanggungjawabannya.

Secara garis besar terdapat beberapa hal penting dalam pelaksanaan ADD berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007, yaitu :

1. ADD bertujuan untuk peningkatan aspek pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan, pengembangan dan perbaikan taraf hidupnya.
2. Azas dan prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif.
3. ADD merupakan bagian yang integral (satu kesatuan/tidak terpisahkan) dari APBDes mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban, dan pelaporannya.
4. Penggunaan ADD ditetapkan sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional Desa dan sebesar 70% untuk pemberdayaan dan pengembangan masyarakat.
5. Diperlukan pelaporan setiap kegiatan yang dibiayai dari anggaran ADD secara berkala (bulanan) dan laporan hasil akhir penggunaan ADD. Laporan ini terpisah dari pertanggungjawaban APBDesa, hal ini sebagai bentuk pengendalian dan monitoring serta bahan evaluasi.

6. Untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Tim Pendamping Kecamatan dengan kewajiban sesuai dengan tingkatan dan wewenangnya. Pembiayaan untuk Tim dimaksud dianggarkan dalam APBDes dan diluar untuk anggaran ADD.

Selanjunya dengan ditetapkannya Undang-Undang Desa, prinsip pelaksanaan ADD semakin diperkuat. Melalui PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, diatur mekanisme pelaksanaan ADD dan juga pengalokasiannya. Secara umum tidak ada perubahan mendasar dalam tata kelola pelaksanaan ADD dengan dikeluarkannya PP No. 43 Tahun 2014 ini, kecuali untuk penetapan formula. Dalam penetapan formula terdapat perubahan yang signifikan terutama dalam penetapan besaran anggaran yang dialokasikan APBD untuk dialokasikan ke rekening Desa. Jika dulu adalah pengurangannya belanja pegawai, dengan diberlakukannya PP No. 43 Tahun 2014 ini pengurangannya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada mayoritas pemerintah daerah, proporsi belanja pegawai dalam APBD merupakan proporsi yang dominan, sehingga tentunya akan memberatkan bagi pemerintah daerah jika mereka harus menyalurkan ADD ke Desa sesuai dengan formula dalam PP No. 43 Tahun 2014, berikut :

$$\text{ADD} = 10\% \times \text{DBH Pajak dan Retribusi} + \text{DAU} - \text{DAK}$$

Pembagian alokasi dana Desa dapat dilihat berdasarkan variabel independen utama dan variabel independen tambahan dengan rincian sebagai berikut :

1. Asas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk disetiap Desa atau yang disebut Alokasi Dana Desa Minimal. Variabel Independen utama sebesar 70% dan Variabel Independen tambahan sebesar 30%.
2. Asas adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang dibagi secara proporsional untuk disetiap Desa berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau Alokasi Dana Desa Proporsional. Variabel Proporsional Utama sebesar 60% dan Variabel Proporsional Tambahan sebesar 40%.

Variabel Independen Utama adalah variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot Desa yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan dan pelayanan dasar umum antar Desa dan mengatasi kemiskinan structural masyarakat di Desa. Sedangkan Variabel independen tambahan adalah variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing daerah yang terdiri dari indicator jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, dan jumlah unit komunitas (dusun).

Melalui Alokasi Anggaran Dana Desa diharapkan Desa akan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat guna meningkatkan peran pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan. Kebijakan ADD yang dititik beratkan pada pembangunan masyarakat peDesaan diharapkan

juga mampu mendorong penanganan beberapa permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa secara mandiri tanpa harus lama menunggu datangnya program-program dari pemerintah kabupaten/kota.

C. Pengembangan Masyarakat

1. Pengertian Pengembangan Masyarakat

Menurut Edi Suharto (2005:47) Pengembangan masyarakat merupakan salah satu metode pekerjaan sosial yang tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka, serta menekankan prinsip partisipasi sosial. Sebagai sebuah metode pekerjaan sosial, pengembangan masyarakat menunjuk pada interaksi aktif antar pekerja sosial dan masyarakat dengan mana mereka terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi suatu program pembangunan kesejahteraan sosial atau usaha kesejahteraan sosial.

Pendapat lain disampaikan Zubaedi (2007:87) Pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Para pekerja kemasyarakatan berupaya memfasilitasi warga dalam proses terciptanya keadilan sosial dan saling menghargai melalui program-program pembangunan secara luas yang menghubungkan seluruh komponen masyarakat.

Sedangkan Fredian Tonny (2014 : 30) Pengembangan masyarakat dikenal dengan istilah *Community Development*. *Community Development* makna yang penting dari dua konsep yaitu : *community* yang bermakna kualitas hubungan

sosial dan *Development* bermakna perubahan kearah kemajuan yang terencana dan bersifat gradual.

Perubahan yang dimaksud di atas adalah perubahan yang bersifat transformatif yang lahir langsung dari masyarakat, yang terjadi melalui proses yang alami. Melalui perubahan yang transformatif dan terencana menjadikan masyarakat lebih kreatif dalam meningkatkan kondisi kehidupannya serta dapat memampukan dirinya sendiri

Dengan demikian, pengembangan masyarakat dapat didefinisikan sebagai metode yang memungkinkan individu-individu dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang memengaruhi kehidupannya

Kegiatan pengembangan masyarakat sejatinya difokuskan pada upaya menolong orang-orang lemah yang memiliki minat untuk bekerjasama dalam kelompok, melakukan identifikasi terhadap kebutuhan dan melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan mereka.

2. Prinsip Pengembangan Masyarakat

Secara garis besar terdapat empat prinsip pengembangan masyarakat menurut Edi Suharto (2005:37-40) yaitu:

1. Pengembangan masyarakat menolak pandangan yang tidak memihak pada sebuah kepentingan (*disinterest*). Pada prinsip ini pengembangan masyarakat berupaya untuk menampakkan nilai-nilai dan mengartikulasikannya secara jelas. Pada prinsip ini pengembangan masyarakat berkomitmen pada

masyarakat miskin dan keadilan sosial, hak asasi manusia dan kewarganegaraan, pemberdayaan dan penentuan diri sendiri, tindakan kolektif dan keanekaragaman.

2. Mengubah dan terlibat dalam konflik. Pengembangan masyarakat bertujuan untuk mengubah struktur yang diskriminatif, memaksa dan menindas di masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini pengembangan masyarakat membangkitkan, menghadirkan informasi yang tidak menyenangkan dan kadang-kadang mengganggu. Di sini pengembangan masyarakat melengkapi kegiatannya dengan gerakan sosial yang baru seperti hak asasi manusia dan gerakan perdamaian.
3. Membebaskan, membuka masyarakat dan menciptakan demokrasi partisipatori. Pembebasan atau liberasi adalah reaksi penentangan terhadap bentuk-bentuk kekuasaan, perbudakan dan penindasan. Pembebasan menuntut pemberdayaan dan otonomi. Pembebasan melibatkan perjuangan menentang dan membebaskan dari orang-orang, ideologi, dan struktur yang sangat berkuasa.
4. Kemampuan mengakses terhadap program-program pelayanan kemasyarakatan. Pengembangan masyarakat menempatkan program-programnya dilokasi yang strategis dapat diakses oleh masyarakat. Lingkungan fisik yang diciptakan melalui pengembangan masyarakat memiliki suasana yang bersahabat dan informal, bukan suasana birokratis, formal dan tertekan.

Sementara pendapat lain oleh Soetomo (2008:82) Prinsip-prinsip umum pengembangan masyarakat sebagai berikut:

1. Pengembangan masyarakat merupakan proses perubahan yang disengaja dan terarah. Perubahan tersebut secara garis besar meliputi dua aspek yaitu perubahan fisik dan teknologi serta perubahan system nilai dan sikap.
2. Pengembangan masyarakat bertujuan meningkatkan taraf hidup warga masyarakat, tidak saja aspek makro yaitu masyarakat secara keseluruhan, melainkan juga unsur mikro yaitu dapat dinikmati oleh segenap warga masyarakat atau paling tidak bagian terbesar warga masyarakat.
3. Mengutamakan pendayagunaan potensi dan sumber-sumber setempat. Sumber-sumber tersebut meliputi faktor fisik, manusia dan sosial. Warga masyarakat kurang peka atau tanggap terhadap sumber-sumber dan potensi yang ada disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, keterampilan, model, teknologi atau sistem nilai sosial budaya. Oleh karena itu pengembangan masyarakat merupakan usaha untuk mendorong dan meningkatkan meningkatkan sikap tanggap masyarakat terhadap potensi dan sumber-sumber yang ada disekitarnya.
4. Mengutamakan kreatifitas dan inisiatif masyarakat. Hal ini berarti dalam kegiatan pengembangan masyarakat memperlakukan masyarakat tidak hanya sebagai objek melainkan sebagai objek pembangunan.
5. Mengutamakan partisipasi masyarakat. Dalam menggerakkan partisipasi masyarakat yang muncul adalah mengerti dan sadar bahwa partisipasinya dalam pembangunan merupakan kewajiban dan haknya.

Conyers mengemukakan adanya tiga kriteria dalam pengertian komunitas.

1. konsep komunitas memiliki komponen-komponen fisik, yang menggambarkan adanya kelompok manusia yang hidup di daerah tertentu dan saling mengadakan interaksi.
2. anggota-anggota komunitas pada umumnya memiliki beberapa ciri khas yang sama yang menyebabkan timbulnya identifikasi mereka sebagai suatu kelompok.
3. suatu komunitas pada umumnya memiliki keserasian dasar dalam hal perhatian dan aspirasi .

Sementara itu Davies menyatakan bahwa elemen-elemen yang ada dalam komunitas adalah lokalitas, hubungan emosional, keterlibatan sosial, dan kepentingan bersama. Ukuran komunitas sebagai satuan kehidupan bersama yang tidak terlalu besar mengakibatkan antar anggota saling mengenal secara pribadi, sehingga menumbuhkan rasa saling percaya, tetapi juga tidak terlalu kecil sehingga dapat dilakukan usaha dan aktifitas bersama secara efisien. Selanjutnya, agar tindakan bersama tersebut lebih bersandar pada partisipasi masyarakat sendiri dibutuhkan adanya kompetensi masyarakat terhadap proses pembangunan di lingkungan kehidupannya.

Kompetensi yang diharapkan meliputi kompetensi pada setiap warga masyarakat secara individual maupun kompetensi komunitas sebagai keseluruhan dan kebulatan hidup bersama. Pada tingkat warga masyarakat kompetensi

terhadap proses pembangunan diwujudkan dalam dua hal yaitu tanggung jawab sosial dan kapasitas. Setiap warga masyarakat merasa bahwa proses pembangunan di lingkungan komunitas untuk meningkatkan taraf hidup, merupakan tanggung jawab mereka sendiri.

Di samping itu, untuk mengaktualisasikan tanggung jawab sosial tersebut warga masyarakat perlu mempunyai kapasitas untuk melakukannya, baik dalam merencanakan maupun melaksanakan pembangunan secara mandiri.

3. Manajemen Pengembangan Masyarakat

Program-program pengembangan masyarakat secara umum dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lapis bawah. Pengembangan masyarakat secara umum diaktualisasikan dalam beberapa tahapan mulai dari perencanaan, pengkoordinasian dan pengembangan berbagai langkah penanganan program kemasyarakatan. Program pengembangan masyarakat umumnya menekankan penerapan *community-based management* (CBM). Yaitu pendekatan pengelolaan program yang menjadikan pengetahuan dan kesadaran masyarakat lokal sebagai dasarnya.

CBM diartikan sebagai suatu strategi untuk mewujudkan praktik pembangunan yang berpusat pada manusia, pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan di suatu daerah berada di tangan organisasi-organisasi dalam masyarakat di daerah tersebut.

Masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan terhadap sumber daya yang dimilikinya. Mereka sendiri yang

mendefinisikan kebutuhan, tujuan, aspirasi dan membuat keputusan demi mencapai kesejahteraan yang diimpikan.

Kebanyakan pekerja sosial menyusun kegiatan pengembangan masyarakat melalui beberapa langkah secara bertahap sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan. Ada enam tahap dalam melakukan perencanaan program yang dikemukakan Edi SUharto (2005:83-86) diantaranya yaitu :

Pertama, tahap *problem posing* (pemaparan masalah) yang dilakukan aktivis dengan mengelompokkan dan menentukan masalah-masalah serta persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dari kelompok sasaran. Masyarakat pada umumnya menyadari permasalahan yang dihadapi. Namun, hal itu tidak diungkapkan. Peran pekerja sosial dalam tahapan ini adalah memberi penjelasan, informasi dan memfasilitasi kegiatan musyawarah atau diskusi diantara warga dari kelompok sasaran.

Kedua, tahap *problem analysis* (analisis masalah). Tahap ini pekerja sosial mengumpulkan informasi mulai dari jenis, ukuran, dan ruang lingkupan permasalahan-permasalahan yang dihadapi warga dan menjadikan informasi tersebut dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan

Ketiga, tahap penentuan tujuan (*aims*) dan sasaran (*objectives*). Tujuan menunjuk pada visi, tujuan jangka panjang, dan *statement* tentang petunjuk umum. Contoh visi pengembangan masyarakat yang dirumuskan oleh pekerja sosial adalah pembentukan masyarakat dimana seluruh warganya terlibat secara

aktif dalam program untuk mempertahankan sistem lingkungan dan membuat faktor sosial, ekonomi dan politik yang ada dapat menjamin persamaan secara maksimal dikalangan warga untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dasar dan pelayanan. Sementara sasaran lebih bersifat khusus dibandingkan tujuan. Pekerja sosial menetapkan apa yang menjadi kepercayaan dan apa yang akan dicapai kemudian menyusun proses dan tugas-tugas khusus. Sasaran yang ditetapkan terdiri atas kegiatan-kegiatan yang dapat diidentifikasi, dianalisis dan dapat diungkapkan secara jelas kepada warga. Sasaran mungkin berjangka panjang, menengah dan pendek. Sasaran jangka panjang secara umum menuntut sejumlah strategi berbeda-beda dan sering disusun dalam berbagai tahap. Sasaran jangka menengah dan pendek berskala lebih kecil lagi. Untuk memahami tujuan dan sasaran jangka panjang, menengah dan pendek dipahami dari sesuatu yang luas ke spesifik, dari yang abstrak ke kongkrit

Keempat, tahap *action plans* (perencanaan tindakan). Tahap ini dilakukan oleh pekerja sosial dengan kegiatan perencanaan berbagai aksi untuk mencapai tujuan. Dalam merencanakan aksi, pekerja sosial memerhatikan tenaga kerja, peralatan, jaringan sosial, dana, tempat, informasi, waktu tersedia, faktor-faktor penghambat, faktor-faktor pendukung, permasalahan-permasalahan *stakeholder*, tugas-tugas nyata yang dilakukan, pihak-pihak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil, pemain-pemain kunci baik secara individual dan kelompok, dilema atau kontradiksi atau ketegangan antara alat dengan tujuan dan hasil-hasil yang mungkin dicapai

Kelima, tahap pelaksanaan kegiatan. Tahap ini dilakukan oleh pekerja sosial dengan mengimplementasikan langkah-langkah pengembangan masyarakat yang telah dirancang. Para aktivis ketika berada dalam tahapan ini dituntut untuk memperhatikan konsekuensi yang mungkin timbul sebagai akibat dari aksi yang dilakukan

Keenam, tahap evaluasi yang dilakukan oleh pekerja sosial secara terus menerus, baik secara formal maupun semi formal pada akhir proses pengembangan masyarakat maupun secara informal dalam setiap bulan, mingguan, dan bahkan harian

4. Strategi Pengembangan Masyarakat

Secara umum ada empat strategi pengembangan masyarakat menurut Ali Aziz (2009:8-9) yaitu:

a. *The growth strategy*

Strategi pertumbuhan ini dimaksudkan untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai ekonomis. Melalui pendapatan perkapita penduduk, produktivitas pertanian, permodalan dan kesempatan kerja yang dibarengi dengan kemampuan konsumsi masyarakat terutama di peDesaan.

b. *The welfare strategy*

Strategi kesejahteraan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat disertai dengan pembangunan kultur dan budaya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi sikap ketergantungan kepada pemerintah.

c. *The Responsive Strategy*

Strategi ini dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan yang dirumuskan masyarakat sendiri dengan bantuan pihak luar (*self need and assistance*) untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi serta sumber-sumber yang sesuai bagi kebutuhan proses pembangunan.

d. *The Intergrated or Holistic Strategy*

Konsep perpaduan dari unsur-unsur pokok etika strategi di atas menjadi alternatif terbaik. Strategi ini secara sistematis mengintegrasikan seluruh komponen dan unsur yang dibutuhkan yaitu mencapai secara simultan tujuan-tujuan yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan masyarakat

5. Fungsi Strategis Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat mempunyai fungsi strategis selain mampu memunculkan kesadaran juga potensial menguatkan kapasitas (*capacity buliding*) sehingga masyarakat berdaya keluar dari jerat kondisi ketertinggalan, keterbelakangan, kemerosotan moral, ketunaan, kebodohan, ketidakberdayaan dan kemiskinan.

Adapun Beberapa fungsi strategis dari pengembangan masyarakat yaitu:

- a. Memberikan pelayanan sosial yang berbasis kepada masyarakat mulai dari pelayanan preventif untuk anak-anak sampai pelayanan kuratif dan pengembangan untuk keluarga yang berpendapatan rendah.

- b. Menolong anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerjasama, mengidentifikasi kebutuhan bersama dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
- c. Memenuhi kebutuhan orang-orang yang tidak beruntung atau tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun oleh deskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, gender, jenis kelamin, usia dan kecacatan.
- d. Menekankan pentingnya swadaya dan keterlibatan informal dalam mendukung strategi penanganan kemiskinan dan penindasan termasuk memfasilitasi partisipasi warga agar aktif terlibat dalam pemberdayaan masyarakat.
- e. Meminimalisir kesenjangan dalam pemberian pelayanan, penghapusan deskriminasi dan ketelantaran melalui strategi pemberdayaan masyarakat (Dumasari. 2014:28-29)

6. Unsur-unsur Pengembangan Masyarakat

Menurut Afandi, (2013:93-94) adapun unsur unsur pengembangan masyarakat antara lain :

a. Proses

Merupakan serentetan tindakan mulai dari penentuan masalah atau tujuan sampai pada pemecahan masalah atau tercapainya tujuan di dalam masyarakat. Berbagai proses dapat di temukan dalam penanggulangan masalah-masalah kemasyarakatan. Proses ini berkaitan dengan meningkatkan kemampuan masyarakat agar berfungsi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Kemampuan

ini tumbuh dan berkembang secara bertahap sebagai akibat upaya yang dilakukan masyarakat dalam menanggulangi masalah-masalahnya.

b. Masyarakat

Masyarakat seringkali diartikan sebagai berikut:

1. Keseluruhan orang yang tinggal di suatu daerah geografis, misalnya: Desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi dan sebagainya.
2. Kelompok orang yang memiliki minat-minat atau fungsi yang sama, misalnya dibidang: kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, pertanian, keagamaan dan lain-lain.
3. Kelompok kecil yang menyadari suatu masalah harus dapat menyadarkan kelompok yang lebih besar.
4. Kelompok yang secara bersama-sama mencoba mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhannya.

c. Partisipasi

Pengertian yang secara umum dapat ditangkap dari istilah partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Pengertian seperti itu, nampaknya selaras dengan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa kamus bahasa sosiologi.

Bornby dalam Mardikanto, (2017 : 81) misalnya, mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Sedang dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk

mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.

Beal dalam Mardikanto, (2017 : 81) menyatakan bahwa partisipasi, khususnya partisipasi yang tumbuh karena pengaruh atau karena tumbuh adanya rangsangan dari luar merupakan gejala yang dapat diindikasikan sebagai proses perubahan sosial yang eksogen (exogenous change).

Verhagen dalam Mardikanto, (2017 : 81) menyatakan bahwa partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat

Menurut Siti Dwiningrum (2011 : 50) partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimiliki (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.

7. Tujuan Pengembangan Masyarakat

Menurut Dumasari (2014:36-37) Tujuan umum pengembangan masyarakat dapat menentukan proses dan orientasi pengambilan keputusan keberlanjutan kegiatan pengembangan masyarakat. Beberapa tujuan umum dari pengembangan masyarakat yaitu:

- a. Mengentaskan masyarakat dari kemiskinan kultural, kemiskinan absolut.
- b. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang lebih berkeadilan.
- c. Mengembangkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat yang lemah dan tak berdaya

- d. Meningkatkan status kesehatan masyarakat secara merata
- e. Meningkatkan kesempatan wajib belajar sembilan tahun bahkan dua belas tahun bagi setiap anggota masyarakat di Desa maupun kota
- f. Melepaskan masyarakat dari belenggu ketunaan, keterbelakangan, ketertinggalan, ketidakberayaan, keterisoliran, ketergantungan dan kemerosotan moral.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang kehidupan.
- h. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
- i. Meningkatkan kemauan dan kemampuan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan usaha produktif kreatif berbasis sumber daya lokal.
- j. Mengurangi dan menghilangkan berbagai bentuk kecemasan sekaligus kekhawatiran warga yang rentan terkena ancaman kerawanan pangan dan kegagalan panen.
- k. Memperkuat daya saing masyarakat di pasar lokal, regional, nasional bahkan internasional yang kompetitif.
- l. Mengurangi angka pengangguran
- m. Meningkatkan jaminan perlindungan hukum bagi warga *grass roots*.
- n. Meningkatkan jaminan sosial bagi warga miskin dan korban bencana alam.
- o. Meningkatkan peluang kerja produktif berbasis ekonomi kerakyatan.
- p. Mengembangkan fungsi kelembagaan lokal untuk pemberdayaan warga *grass roots*.
- q. Membangun masyarakat kreatif dan komunikatif dalam mengakses ragam informasi pembangunan inovatif.

- r. Memperkuat kesadaran masyarakat agar tidak bergantung pada pihak donor atau pemberi dana bantuan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam menentukan penelitian, terlebih dahulu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas di dalam penelitian serta memahami makna yang sebenarnya dari jenis penelitian tersebut, sehingga memudahkan untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya dalam menganalisis data. Adapun Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif.

Penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian. (Usman,2009:129). Adapun Menurut David Wiliams dalam Moleong, (2013:5) bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.

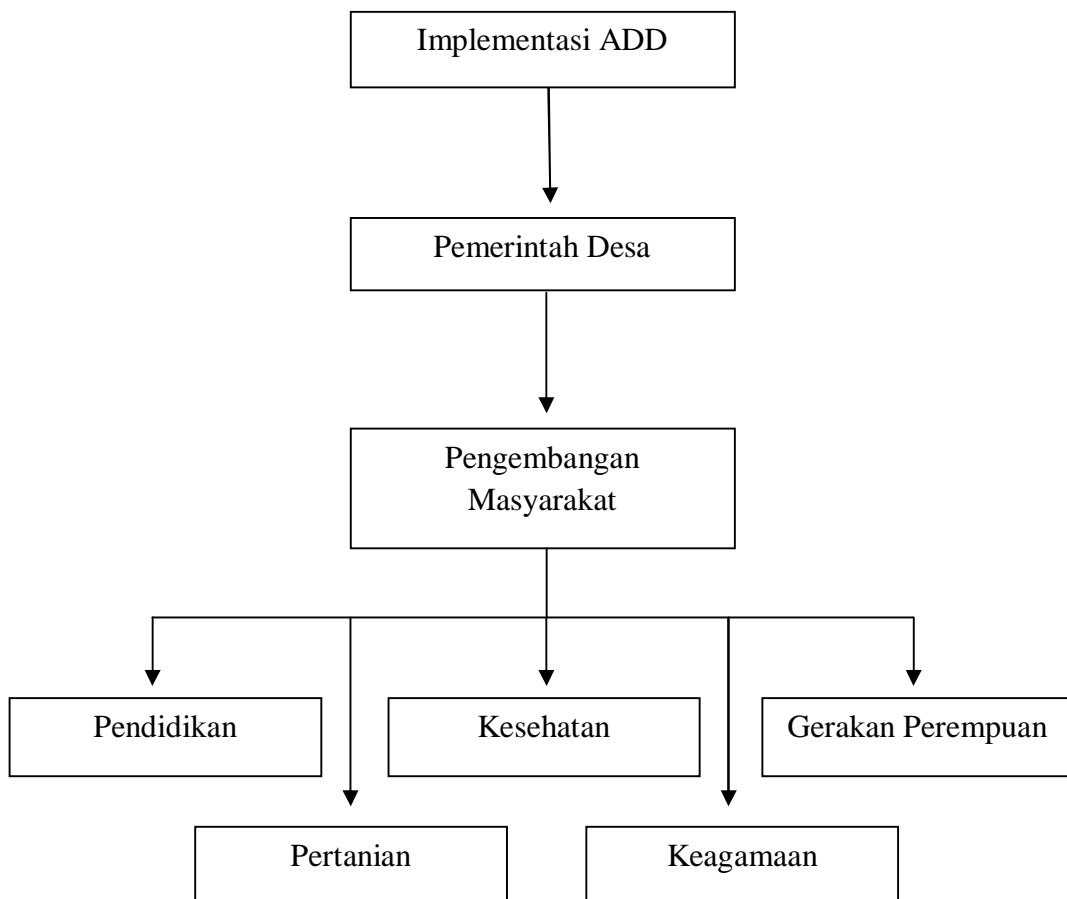
Jadi jelas definisi memberi gambaran bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar alamiah, metode alamiah, dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian alamiah. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yakni laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut bisa berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.

Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan gambaran tentang Implementasi Anggaran Dana Desa Terhadap Pengembangan Masyarakat di Desa Ledong Timur Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan.

B. Kerangka Konsep

Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka konsep dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Kerangka konsep



C. Definisi Konsep

Definisi konsep adalah suatu abstraksi atau gambaran yang dibangun dengan menggeneralisasikan dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

1. Implementasi adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan secara efektif.
2. Implementasi Kebijakan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu tertentu.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang dapat digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan atau pengembangan masyarakat.
5. Pengembangan masyarakat adalah Proses penguatan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip keadilan sosial serta partisipasi

yang dilakukan sendiri oleh masyarakat untuk kepentingan bersama atau kepentingan umum.

D. Kategorisasi

Kategorisasi adalah penyusunan kategori, dengan kata lain kategori merupakan salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan dan bagian pengalaman yang disusun berdasarkan pikiran, intuisi, pendapat, kriteria tertentu. Maka kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

Tabel 3.1 Kategorisasi

No	Kategorisasi	Indikator
1.	Implementasi Anggaran Dana Desa	a. Tujuan dan Sasaran b. Program c. Efektif dan Efisien d. Hambatan
2.	Pengembangan Masyarakat	e. Sosialisasi f. Penyuluhan Program g. Berkelanjutan h. Partisipasi

E. Informan atau Narasumber

Menurut Sugiyono (2014 : 52) dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya dengan pertimbangan dengan memilih orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan akan memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek yang ingin diteliti.

Menurut David Williams dalam Moleong, (2013 : 5) menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema khusus ke tema umum.

F. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :

1. Teknik Pengumpulan Data Primer
 - a. Metode wawancara (Interview), yaitu proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan terhadap dua orang atau lebih dengan bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan yang disampaikan informan.

b. Metode observasi, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dilapangan.

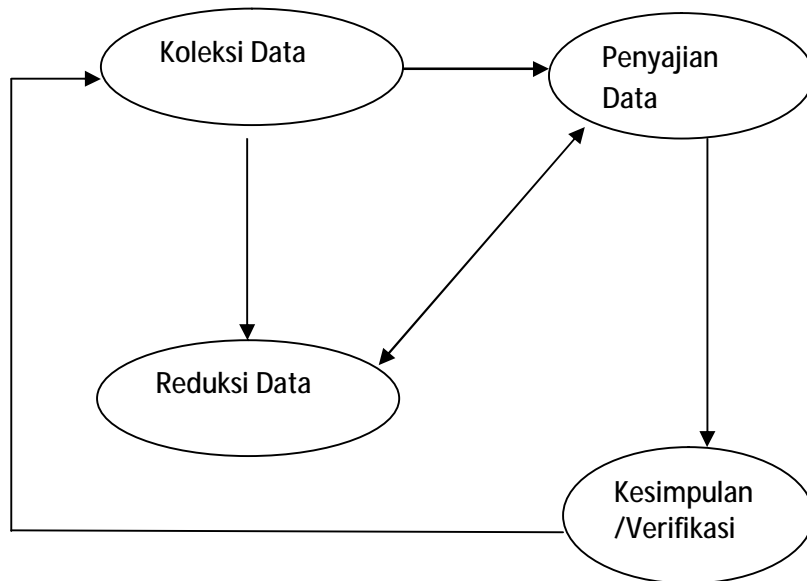
2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui studi bahan-bahan kepustakaan yang diperlukan untuk mendukung data-data primer, yang dilakukan dengan instrument studi kepustakaan.

G. Teknik Analisis Data

Analisa data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan seperti yang disarankan dan sebagai usaha memberikan bantuan dan tema. Dengan demikian analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola kategorisasi dan satu uraian dasar.

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono, (2014 : 91) aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.



Gambar 3.2 Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya kurang jelas sehingga setelah di teliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

H. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Ledong Timur Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan. Desa Ledong Timur berpenduduk sebanyak 5.070 jiwa. Desa Ledong Timur terletak di perbatasan kabupaten Asahan dengan ibukota Kabupaten Labuhanbatu Utara, Aekkanopan Kecamatan Kualuh Hulu.

1. Gambaran Umum Desa Ledong Timur

1. Sejarah Desa

Awal mula sejarah Desa ini adalah dari Desa Ledong Barat. Pada tahun 1990 kecamatan Pulau rakyat dimekarkan menjadi 2 kecamatan, yaitu kecamatan Pulau rakyat dan Kecamatan Aek Kuasan. Pada tahun 2009, kecamatan Aek Kuasan dimekarkan menjadi dua yaitu, Kecamatan Aek Kuasan dan Kecamatan Aek Ledong.

Dari pemekaran kecamatan Pulau rakyat pada 1990 Tersebut, Desa Ledong Barat yang merupakan cikal bakal Desa Ledong Timur memiliki 14 dusun. Kemudian pada 1994 Desa Ledong Barat mekar menjadi dua Desa, yaitu Desa Ledong barat dan Desa Ledong Timur yang hingga kini memiliki 9 dusun.

Adapun kesepakatan nama Desa tersebut merupakan hasil mufakat bersama tokoh masyarakat dikarenakan posisi Desa yang mengarah ke Timur, sehingga menjadikan nama Desa Ledong Timur.

Adapun pejabat Desa Ledong Timur dari mulai berdiri hingga sekarang adalah sebagai berikut :

1. Tahun 1994-2012 Irham Edy sebagai kepala Desa
2. Tahun 2013-2018 Syahrizal sebagai kepala Desa

2. Demografi Desa

a. Jumlah Penduduk dan Komposisi Penduduk

Jumlah penduduk pada tahun 2017 di Desa Ledong Timur sebanyak 5070 jiwa. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk dan kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk Desa Ledong Timur

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
	Laki Laki	2554 jiwa
	Perempuan	2516 jiwa
	Total	5070 jiwa

Sumber : Data Kependudukan Desa Ledong Timur Tahun 2017

b. Letak dan Luas Wilayah

Desa Ledong Timur masuk dalam wilayah Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan. Berjarak 2 Km dari kantor Camat Aek Ledong dan terdiri dari 9 Dusun yang memiliki batas wilayah sebagai berikut ;

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Aek Ledong
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Aekkanopan Timur
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukarame
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ledong barat

Jarak antara Ibukota Desa dengan Ibukota kabupaten sejauh 65 Km, dengan lama jarak tempuh menggunakan kendaraan bermotor selama 2 Jam. Desa Ledong Timur terletak di perbatasan Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

c. Jenis Tanah

Tanah di Desa Ledong Timur merupakan tanah campuran antara tanah liat dan tanah gambut. Sebagian besar tanah gambut berada di dusun VIII dan dusun IX.

d. Iklim

Desa Ledong Timur memiliki iklim tropis dan lembab. Intensitas penyinaran matahari selalu tinggi dan sumber daya air yang cukup banyak sehingga menyebabkan tingginya penguapan yang menimbulkan awan tebal. Curah hujan terbanyak jatuh pada bulan September hingga Desember, berkisar diantara 2355-2366 mm setiap tahun. Sedangkan bulan kemarau jatuh pada bulan Februari hingga bulan Juli. Suhu udara rata rata 30 derajat celcius. Suhu udara terendah 26 derajat celcius, suhu derajat tertinggi 34 derajat celcius. Dengan kelembababan udara berkisar antara 40%-100%.

3. Visi Misi Desa Ledong Timur

a. Visi

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa Ledong Timur yang didukung pelayanan pemerintahan yang baik serta pengembangan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan filsosi sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi nilai nilai ajaran agama yang dianut, benar benar telah dijadikan tuntunan utama setiap nafas kehidupan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pribadi, sehingga adanya kekuatan batin yang mendalam di jiwa setiap individu.
- b. Menumbuh kembangkan kebudayaan yang sudah ada, sehingga mampu bertahan dan bersifat akomodatif terhadap kemajuan peningkatan derataj, harkat, martabat manusia dan ikut dalam kontruksi.
- c. Kondisi kehidupan sosial masyarakat dipandang dari sisi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban sudah semakin mengikat sehingga menjadi kondusif untuk memacu pembangunan
- d. Stabilitas ekonomi yang dapat dipertahankan dan bersifat dinamis, produktifitas, mengurangi pengangguran, menurunkan kemiskinan, memnbina usaha kecil kebutuhan masyarakat.
- e. Iklim demokratisasi yang semakin kondusif, stabilitas politik, maka keamanan dan ketertiban terkendali, partisipasi dan kecerdasan masyarakat berpolitik semakin baik, penyelenggaraan pemerintahan yang kondusif, kualitas dan

profesionalisme aparatur meningkat dan kapasitas yang semakin kuat sehingga tercapai Ledong Timur bersatu.

B. Misi

Pembangunan jangka menengah Desa Ledong Timur tahun 2013/2018 sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas pemerintahan secara transparan
- b. Membudayakan masyarakat agar menganut pola hidup bersih
- c. Memberi penyuluhan tentang bahaya narkoba
- d. Meningkatkan pendapatan warga
- e. Melancarkan roda perekonomian
- f. Menciptakan lapangan kerja
- g. Melestarikan tradisi gotong royong
- h. Mendorong masyarakat berpartisipasi dalam setiap pembangunan
- i. Membiasakan masyarakat untung menanggulangi segala keperluan dan kebutuhannya sendiri
- j. Menggunakan dana dari pemerintah secara efektif dan se-efisien mungkin.

4. Susunan pembagian tugas dan Fungsi Kantor Desa Ledong Timur

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 bahwa susunan pembagian tugas dan fungsi setiap Jabatan Perangkat Desa antara lain :

a. Kepala Desa

Tugas kepala Desa yakni : menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan.

Fungsi Kepala Desa yakni:

- 1). Menyelenggarakan pemerintah Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan pengelolaan wilayah.
- 2). Melakukan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana perDesaan dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
- 3). Pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
- 4). Pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang ekonomi, sosial, budaya, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna
- 5). Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Sekretaris Desa

Tugas sekretaris Desa yakni : membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Fungsi sekretaris Desa yakni :

- 1). Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.

- 2). Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, investasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
- 3). Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala Desa, perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan dan Desa lainnya.
- 4). Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran dan pendapatan dan belanja Desa, menginventaris data data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan pelaporan.

c. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Tugas Yakni : membantu sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas tugas pemerintahan.

Fungsi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum yakni :

- 1). Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi
- 2). Penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventasiasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
- 3). Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventaris data data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

4). Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

d. Kepala Urusan Keuangan

Tugas : Membantu sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas tugas pemerintahan.

Fungsi :

- 1). Pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan
- 2). Pengurusan administrasi penghasilan kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa
- 3). Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan

e. Kepala Urusan Perencanaan

Tugas : Membantu sekretaris Desa dalam urusan perencanaan pembangunan Desa dalam mendukung pelaksanaan tugas tugas pemerintahan

Fungsi :

- 1). Menyusun rancangan pembangunan Desa yang telah disepakati dalam musyawarah dan rapat Desa
- 2). Menyusun rancangan pembangunan prioritas Desa sebelum musyawarah Desa
- 3). Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan

f. Kepala Seksi Pelayanan

Tugas : Membantu kepala Desa sebagai tugas pelaksana operasional

Fungsi ;

- 1). Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat

- 2). Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan
- 3). Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan

g. Kepala seksi kesejahteraan

Tugas : Membantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional

Fungsi :

- 1). Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perDesaan dan pembangunan bidang pendidikan
- 2). Melaksanakan tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga an karang taruna

h. Kepala seksi pemerintahan

Tugas : Membantu kepala Desa sebagai tugas pelaksanaan operasional.

Fungsi :

- 1). Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, pendataan dan pengelolaan profil Desa.
- 2). Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

5. Program Kerja Pengembangan Masyarakat Desa Ledong Timur Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan

Dalam rangka pemerataan Pembangunan Desa menuju kemandirian Desa dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Desa diperlukan partisipasi seluruh masyarakat melalui pembagunan skala Desa. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut diperlukan sumber dana yang dibutuhkan untuk menjaga atau membangun sarana dan prasarana Desa.

Selain pembangunan berbasis sarana prasarana, pembangunan sumber daya masyarakat juga patut dikembangkan, hal ini wajib dilakukan sebagai upaya peningkatan mutu masyarakat Desa dan sebagai upaya pengembangan diri masyarakat.

Berikut program kerja pelaksanaan pengembangan sumber daya masyarakat di Desa Ledong Timur :

Tabel 3.3

Program Kerja Pengembangan Masyarakat Desa Ledong Timur Tahun 2018

No	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Sumber Dana
1	Seminar SDM Teknologi Tepat Guna	Peningkatan SDM	1 Paket	APBDes
2	Sosialisasi Kelompok Tani	Peningkatan SDM	1 Paket	APBDes

Sumber : Kepala Desa Ledong Timur

Tabel 3.4**Program Kerja Pengembangan Masyarakat Desa Ledong Timur Tahun 2017**

No	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Sumber Dana
1	Peningkatan kapasitas kelompok perempuan berupa kursus menjahit	Peningkatan keterampilan	1 Paket	APBDes
2	Pelatihan Budi daya ikan Lele dan Ikan Gurami	Pemberdayaan kelompok masyarakat dan	1 Tahun	APBDes
3	Pelatihan ketrampilan dan produksi sapu lidi hias bermotif	Peningkatan ketrampilan	1 Paket	APBDes
4	Pelatihan Pengolahan kotoran Hewan menjadi Pupuk Cair	Peningkatan SDM dan Ekonomi	1 Paket	APBDes
5	Pelatihan dan Produksi olahan minyak Kelapa Murni (VCO)	Peningkatan SDM dan Ekonomi	1 Paket	APBDes
5	Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani	Peningkatan SDM dan Ekonomi	10 Ekor Lembu	APBDes

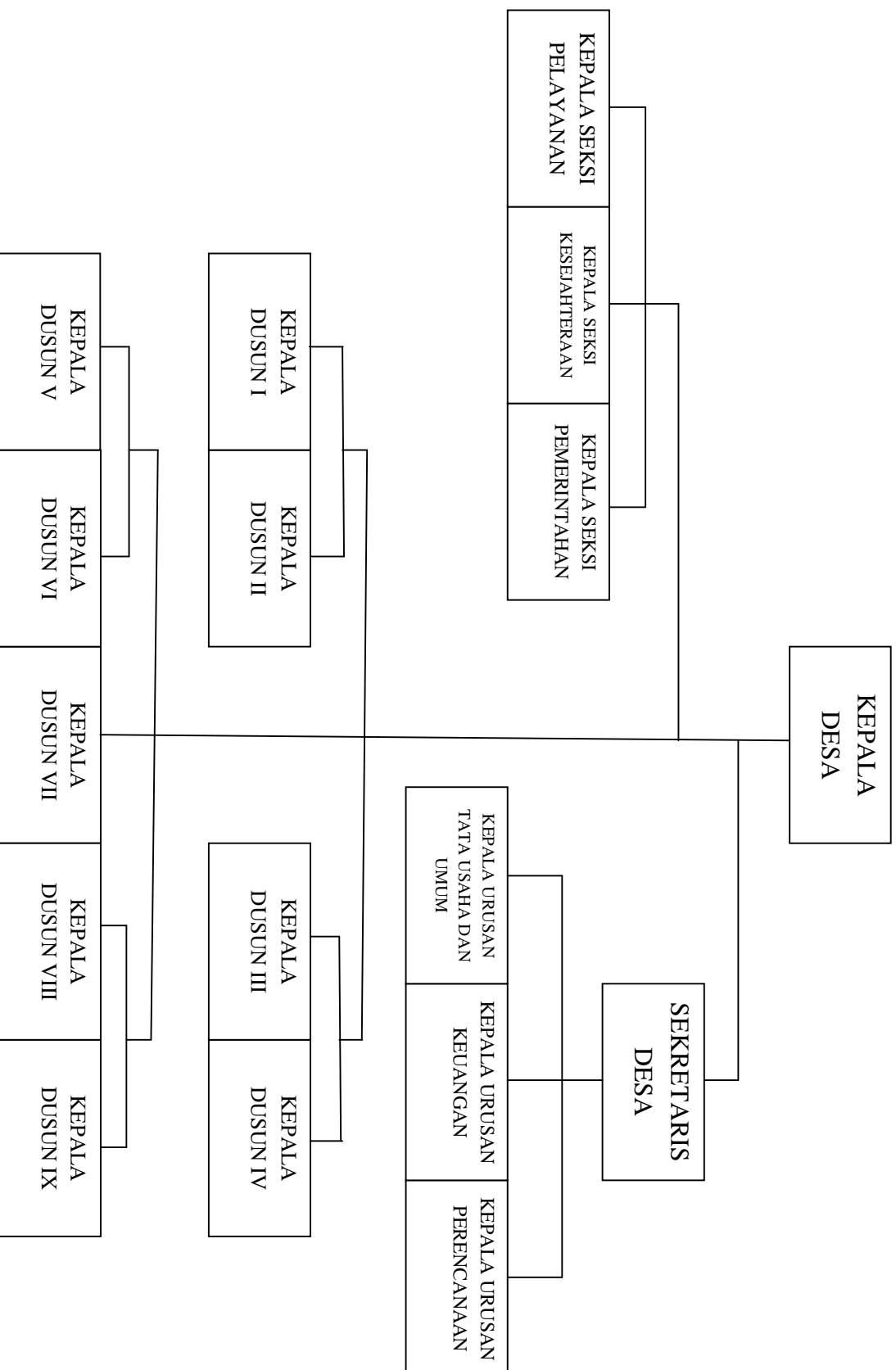
Sumber : Kepala Desa Ledong Timur

Tabel 3.5**Program Kerja Pengembangan Masyarakat Desa Ledong Timur Tahun 2016**

No	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Sumber Dana
1	Pelatihan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	Pemahaman tentang Tugas Fungsi Bumdes	3 Kegiatan	APBDes
2	Seminar Ketrampilan dan kewirausahaan	Pemahaman berwirausaha	1 Paket	APBDes
3	Pelatihan Ketrampilan dan kewirausahaan pembuatan kerajinan tangan dari limbah Rumah Tangga	Peningkatan ketrampilan	1 Paket	APBDes
4	Pelatihan ketrampilan dan produksi sapu lidi hias bermotif	Peningkatan ketrampilan dan pengembangan pemanfaatan Sumber daya alam	1 Paket	APBDes

Sumber : Kepala Desa Ledong Timur

**Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Ledong Timur
Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan**



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian

1. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian data yang telah dikumpulkan dari lapangan melalui observasi dan wawancara terhadap narasumber penelitian, selanjutnya dapat diperoleh data data yang berhubungan dengan karakteristik responden menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan dan jabatan atau pekerjaan

Selain itu, data primer dari penelitian ini berupa jawaban jawaban yang diberikan atas pertanyaan pertanyaan yang diajukan narasumber terkait dengan pelaksanaan dalam Implementasi Anggaran Dana Desa terhadap Pengembangan Masyarakat di Desa Ledong Timur Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan dan juga analisis secara objektif dan mendalam dari hasil dan pembahasan dalam penelitian ini.

B. Hasil Penelitian

1. Identifikasi Narasumber

a. Distribusi narasumber menurut jenis kelamin

Berdasarkan jenis kelamin narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu, laki laki dan perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan perentase untuk masing masing kategori tersebut.

Tabel 4.1

Distribusi narasumber berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki Laki	7	70 %
2	Perempuan	3	30%
	Jumlah	10	100%

Sumber : Hasil penelitian, 2018

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin Laki Laki dengan frekuensi sebanyak 7 Orang atau persentase 70%, sedangkan sisanya berasal dari jenis kelamin perempuan dengan frekuensi 3 orang atau persentase 30%.

b. Distribusi narasumber berdasarkan tingkat pendidikan

Berdasarkan dari tingkat pendidikan, narasumber dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu, tingkat SD, SMP, SMA, SARJANA. Pada tabel 4.2 berikut disajikan persentase untuk masing masing kategori berikut :

Tabel 4.2

Distribusi Narasumber berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	SD	0	0
2	SMP	0	0
3	SMA	5	50%
4	SARJANA	5	50%
	Jumlah	10	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2018

Berdasarkan hasil dari tabel 4.2 di atas dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber memiliki latar belakang dengan tingkat pendidikan Sarjana sebanyak 5 orang dengan persentase 50%, sedangkan tingkat pendidikan SMA sebanyak 50 orang dengan persentase 50%.

c. Distribusi narasumber berdasarkan pekerjaan

Berdasarkan yang dilihat dari jabatan atau pekerjaannya, narasumber dikelompokkan menjadi enam kategori yaitu, Perangkat kantor Desa, Pendamping Desa, Petani, Karyawan swasta, Ketua Bumdes dan ibu rumah tangga. Pada tabel 4.3, kita akan melihat persentase untuk masing masing kategori narasumber berdasarkan pekerjaan.

Tabel 4.3

Distribusi Narasumber berdasarkan pekerjaan

No	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Perangkat Desa	1	10%
2	Pendamping Desa	1	10%
3	Ketua Bumdes	1	10%
4	Petani	1	10%
5	Karyawan swasta	5	50%
6	Ibu rumah tangga	1	10%
	Jumlah	10	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2018

Berdasarkan dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa mayoritas dalam penyebaran wawancara kepada narasumber yang memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta dengan frekuensi sebanyak 5 orang atau 50%, tingkat pekerjaan sebagai Perangkat desa yakni 1 orang atau 10%, sebagai Pendamping desa 1 orang atau 10%, sebagai ketua bumdes 1 orang atau 10%, Ibu rumah tangga 1 orang atau 10%, dan Petani 1 orang atau 10%.

2. Implementasi Anggaran Dana Desa terhadap Pengembangan Masyarakat di Desa Ledong Timur Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan

a. Tujuan dan sasaran

1. Tujuan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pada wawancara yang telah dilakukan pada hari Senin, 03 September 2018 dengan Ibu Sumiyati selaku Plt. Kepala Desa Ledong Timur, bahwa tujuan dari anggaran dana Desa yakni Untuk Kemandirian dan Kesejahteraan masyarakat Desa Ledong Timur

Hal senada juga disampaikan oleh ibu Rusdiah selaku pendamping Desa Ledong Timur pada wawancara Senin 03 September 2018, bahwa tujuan dari anggaran dana Desa yaitu digunakan untuk Pembangunan Desa sesuai dengan target pemerintah pusat bahwa Desa sabagai ujung tombak pembanguan serta masyarakat mandiri berkemajuan.

Sementara itu, wawancara dengan bapak M.Hutapea pada Senin 03 September 2018, bahwa tujuan anggaran dana Desa untuk pembangunan infrastruktur dan program program pengentasan kemiskinan masyarakat Desa Ledong Timur.

Kemudian Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pada wawancara yang telah dilakukan pada hari Senin, 03 September 2018 dengan Bapak Lot Marsius Siburian selaku ketua bumdes Ledong Timur, beliau mengatakan bahwa tujuan dana Desa yaitu untuk pembangunan infrastruktur sebagai penunjang fasilitas umum dan juga pengembangan masyarakat.

Sementara menurut ibu Helmalia Sari berdasarkan wawancara pada Selasa 04 September 2018, sepengetahuan beliau bahwa tujuan dari alokasi dana Desa adalah pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan warga Ledong Timur.

Hal senada juga turut disampaikan oleh Bapak Darwin, menurut beliau tujuan dari alokasi dana Desa adalah untuk pembangunan infrastruktur di Desa Ledong Timur serta program program yang adpat memandirikan masyarakat

Sama halnya dengan bapak Darwin, menurut Bapak Joko bahwa yang menjadi tujuan alokasi dana Desa ialah untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan perekonomian warga

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Albert prawira Utama SP, menurut beliau alokasi dana Desa bertujuan untuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusianya, yaitu peningkatan Sumber daya masyarakat

Sementara itu, menurut bapak Hanafi Habib SPd, sepengetahuan beliau bahwa tujuan alokasi dana Desa ialah untuk perbaikan infrastruktur sarana dan prasarana Desa, serta untuk pemberdayaan masyarakat Desa.

Adapun menurut Bapak Dedek agung S.Sos, beliau mengatakan bahwa tujuan alokasi dana Desa ialah untuk pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Ledong Timur, kemudian pembinaan masyarakat dan untuk pemberdayaan maupun pelatihan terhadap warga Desa Ledong Timur, namun dirinya tidak mengetahui secara detail seperti apa pengalokasian dana Desa di Ledong Timur.

2. Sasaran

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Sumiyati selaku Plt Kepala Desa Ledong Timur, berdasarkan program yang ada sudah tepat sasaran karena sesuai kebutuhan masyarakat, masyarakat menyampaikan aspirasinya saat rapat Desa, kemudian kita sepakati secara bersama.

Sementara itu hasil wawancara oleh ibu Rusdiah selaku pendamping Desa Ledong Timur, bahwa semua program yang ada sudah tepat sasaran karena memang dibutuhkan masyarakat dan disepakati masyarakat secara bersama saat rapat Desa.

Adapun hasil wawancara terhadap Bapak M.Hutapea selaku tokoh masyarakat Desa Ledong Timur, bahwa yang menjadi tujuan alokasi dana Desa adalah pembangunan infrastruktur dan program kemasyarakatan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan. Menurut beliau sejauh ini program pembangunan yang dilakukan pemerintah Desa kebanyakan berfokus pada saluran drainase sesuai dengan janji kampanye kepala Desa, dan program tersebut memang dibutuhkan masyarakat Desa mengingat apabila curah hujan tinggi, akan menimbulkan genangan air. Sejalan ini sudah tepat sasaran untuk proyek fisik, namun untuk proyek non fisik beliau kurang mengetahui pasti.

Sementara menurut bapak Lot Marsius Siburian, ketua bumdes Ledong Timur, beliau kurang mengetahui apa saja pembangunan fisik yang terjadi di Desa Ledong Timur secara detail, namun dari segi kemasyarakatan, bahwa cukup banyak program pelatihan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah Desa

Ledong Timur. Untuk program pengembangan masyarakat menurut beliau sudah tepat sasaran.

Adapun menurut bapak Albert prawira utama SP, dirinya tidak mengetahui apakah program yang ada sudah tepat sasaran atau tidak karena dirinya tidak terlibat mengingat kesibukan beliau sebagai karyawan swasta yang cukup padat.

Menurut Bapak Joko, yang menjadi sasaran alokasi dana Desa adalah infrastruktur Desa sebagai tolok ukur pembangunan, dan juga peningkatan ekonomi masyarakat kelas bawah, namun untuk penerapan di Desa Ledong Timur sendiri, beliau tidak mengetahui secara pasti apakah implemenasi alokasi dana Desa seperti apa dilapangan, dirinya mengaku hanya mengetahui program pembangunan fisik saja, itupun karena ada plang informasi pembangunan yang bersumber dari dana Desa.

Sementara itu menurut bapak Darwin, tidak semua program yang ada tepat sasaran, karena tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat Desa Ledong Timur, padahal ada 9 dusun di Desa Ledong Timur, namun hanya sebagian dusun saja yang mendapat program dari pemerintah Desa

Menurut Ibu Hemalia sari, sejauh ini program yang ada sudah tepat sasaran, contohnya seperti kami para ibu rumah tangga, ada pelatihan kursus menjahit dan bantuan mesin jahit sehingga kami dapat membantu perekonomian keluarga kami.

Adapun menurut Bapak Dedek agung S.Sos beliau tidak mengetahui apa saja program yang ada dan dilaksanakan oleh pemerintah Desa, sehingga beliau tidak dapat menarik kesimpulan apakah program yang ada tepat sasaran atau tidak

Menurut Bapak Hanafi Habib, sejauh ini program yang ada sudah tepat sasaran namun belum maksimal karena dana Desa yang ada jauh dikatakan memenuhi target, sehingga berbagai permintaan masyarakat harus menyesuaikan dengan anggaran yang ada.

b. Program

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Sumiyati selaku Plt Kepala Desa Ledong Timur, bahwa program yang telah ditawarkan oleh pemerintah Desa Ledong Timur dari alokasi anggaran dana Desa yakni meliputi pembangunan infrastruktur seperti pengerasan jalan, pembuatan plat titi beton, pembangunan drainase, dan rehab gedung aula Desa serta pengelolaan informasi komunikasi profil Desa.

Sementara itu Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Darwin pada Selasa 04 September 2018, menurut beliau sebagian program yang dilaksanakan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat karena hanya beberapa kelompok masyarakat didusun tertentu saja yang dapat merasakannya, beliau menambahkan bahwa banyak program yang dibutuhkan masyarakat, yaitu program yang mampu meningkatkan perekonomian warga.

Adapun menurut Joko salah satu tokoh pemuda Desa Ledong Timur, beberapa program untuk masyarakat banyak yang tidak sesuai keinginan masyarakat karena hanya diperuntukkan kepada kelompok tertentu saja, sementara kepala Desa kurang aktif untuk turun langsung ke masyarakat apa yang dibutuhkan masyarakat. Beliau juga menambahkan bahwa banyak program yang dapat diterapkan, seperti kegiatan olahraga dan program kepemudaan, menurutnya

program olahraga jangan hanya dilaksanakan jika hanya mendekati pemilihan kepala Desa, hingga masa berakhirnya kepemimpinan kepala Desa tidak ada satupun kegiatan olahraga di Desa Ledong Timur.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Hanafi habib S.Pd, menurut beliau masyarakat memiliki banyak keinginan untuk dijadikan program, namun ada beberapa program yang tidak sesuai dengan visi misi Desa. Beliau juga menambahkan bahwa pemerintah Desa harus mengutamakan pembangunan infrastruktur Desa, serta menggalakan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.

Sementara itu hal berbeda disampaikan oleh Bapak Dedek Agung S.Sos, beliau tidak mengetahui program apa saja yang ditawarkan maupun yang dilaksanakan pemerintah Desa Ledong Timur, karena minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah Desa Ledong Timur kepada dirinya dan beberapa tetangganya. Adapun menurut beliau, beberapa program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat adalah program pembinaan remaja, dikarenakan narkoba sudah sangat dekat di masyarakat.

Adapun menurut Bapak Albert Prawira Utama SP, program yang ada sepertinya sudah sesuai kebutuhan masyarakat karena sejauh ini masyarakat tidak ada ribut perihal alokasi anggaran dana Desa sepengetahuan beliau.

Sementara menurut Bapak M.Hutapea, perihal program beliau mengatakan bahwa tentunya masyarakat banyak keinginannya, hanya saja dana yang terbatas tentu tidak semua esuai dengan keinginan masyarakat, tapi kembali lagi bahwa setiap tahun program tersebut berubah atas dasar kebutuhan warga disetiap dusun

c. Efektif dan Efisien

1. Efektif

Berdasarkan hasil wawancara dengan Plt Kepala Desa Ibu Sumiyati bahwa program yang dilaksanakan sudah berjalan efektif karena memang merupakan program yang di inginkan masyarakat, meski memang tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat dikarenakan keterbatasan dana yang ada, hanya saja setiap program yang ada sudah mewakili keterwakilan masyarakat

Hal senada juga dikatakan Ibu Rusdiah Selaku Pendamping Desa Ledong Timur, bahwa semua program yang ada sudah berjalan dengan efektif dan tepat sasaran, pemerintah Desa selalu berupaya menyusun program berdasarkan keperluan dan kepentingan masyarakat dengan mempertimbangkan anggaran yang ada.

Sementara itu menurut Ibu Helmalia Sari bahwa dirinya kurang mengetahui apa saja program yang ada, hanya saja terkhusus program pengembangan masyarakat kepada kaum ibu ibu berupa pelatihan menjahit dan bantuan mesin jahit sudah sangat tepat. Adapun program pembangunan yang turut mereka rasakan seperti perbaikan drainase dilingkungan sekita rumah beliau.

Selain itu berdasarkan wawancara dengan Bapak Lot Marsius Siburian selaku ketua Bumdes, program yang ada untuk bumdes sangat efektif, seperti halnya pelatihan bagi bumdes di tingkat kabupaten maupun provinsi, sehingga Bumdes bisa semakin membaik dan berkembang di Desa Ledong Timur

Sementara itu menurut Bapak M Hutapea bahwa program yang ada terkhusus pembangunan infrastruktur Drainase disetiap dusun sangatlah baik

karena dapat mengurangi resiko banjir di Desa Ledong Timur. Selain itu juga perihal adanya alokasi dana Desa terjadi pemerataan pembangunan Desa dengan kota.

Adapun menurut Bapak Albert Prawira Utama SP, beliau melihat dan turut merasakan manfaat adanya Alokasi dana Desa dengan program perbaikan drainase sehingga mengurangi resiko banjir ketika hujan turun.

Lain halnya dengan Bapak Joko, menurut beliau dirinya dan beberapa tetangga tidak mendapat sedikit manfaat Alokasi Dana Desa, karena beliau tidak mengetahui apa program yang dilaksanakan pemerintah Desa karena kurangnya informasi dari perangkat Desa ke masyarakat Desa di dusun mereka.

Hal senada juga turut disampaikan Bapak Dedek Agung S.Sos bahwa dirinya tidak mengetahui apa program yang pemerintah Desa buat sehingga beliau tidak dapat menjawab program sudah berjalan dengan efektif atau tidak.

Namun menurut Bapak Hanafi Habib S.Pd, adapun program yang terlaksana sudah berjalan efektif. Contohnya adalah beautifikasi Desa di beberapa dusun dengan pembangunan infrastruktur. Beberapa kelompok warga mendapat pelatihan untuk meningkatkan ekonomi mereka, ada juga penyuluhan bahaya narkoba dan kesehatan.

Begitupun dengan Bapak Darwin, menurut beliau terkhusus program pembangunan infrastruktur sudah cukup baik, tapi untuk program kemasyarakatan kurang baik karena tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat

b. Efisien

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sumiyati selaku Plt Kepala Desa, bahwa semua program yang dirancang sudah dijalankan sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana mestinya.

Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Rusdiah selaku Pendamping Desa, bahwa program berjalan tepat waktu berkat kerjasama yang baik antara pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang cukup antusias mengikuti setiap program demi program yang berjalan.

Sementara itu menurut Bapak Darwin, beliau menilai bahwa program pembangunan yang dicanangkan berjalan tepat waktu berdasarkan informasi dari plang proyek pembangunan yang tertera, namun untuk program bidang pengembangan masyarakat dirinya kurang begitu mengetahui seperti apa detail informasi pelaksanaannya.

Begitupun hasil wawancara dengan Bapak Hanafi Habib SPd, beliau menyatakan menurut pengamatan beliau semua program berjalan dengan baik dan sesuai dengan estimasi waktu yang dicanangkan.

Namun hal berbeda dikatakan oleh Bapak Lot Marsius Siburian, bahwa untuk dana Bumdes selalu turun diakhir tahun, sehingga program Bumdes harus dilaksanakan setiap akhir tahun.

Adapun beberapa narasumber lain seperti Bapak M Hutapea, Bapak Joko, Bapak Dedek Agung S.Sos, Bapak Albert Prawira Utama SP dan Ibu Helmalia Sari mengatakan tidak mengetahui apakah program yang dicanangkan dalam

pelaksanaannya sudah tepat waktu atau tidak karena tidak terlalu mengikuti perkembangan pemerintah Desa secara intensif

d. Hambatan

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sumiyati, tidak ada hambatan berarti pemerintah Desa Ledong Timur dalam menjalankan program yang direncanakan, sejauh ini program berjalan dengan baik, meskipun proses pencairan dana Desa bergelombang.

Sementara itu menurut Ibu Rusdiah selaku Pendamping Desa, tidak ada hambatan berarti bagi proses implementasi program, meski proses pencairan yang bergelombang, pemerintah Desa Ledong Timur melakukan perencanaan program berdasarkan urutan gelombang pencairan yang tentunya berbeda anggarannya setiap gelombang, terkhusus pembangunan fisik dilaksanakan di gelombang pertama dan kedua, sementara untuk pengembangan masyarakat dilakukan setelah anggaran gelombang ketiga telah keluar.

Adapun beberapa Hambatan dalam proses implementasi program Menurut bapak Lot Marsius Siburian dalam konteks bumdes adalah ketidak seragaman pola pikir yang ada di masyarakat dikarenakan berbagainya profesi dan latar pendidikan sehingga ada keterlambatan dalam proses pembuatan produk atau proses implementasi.

Sementara menurut Bapak Hanafi Habib SPd, adapun yang menjadi hambatan masyarakat dalam partisipasi setiap program yang akan diterapkan oleh pemerintah Desa dalam hal pengembangan masyarakat adalah beragamnya jenis profesi yang ada di masyarakat sehingga menyebabkan kesibukan yang tentunya

berbeda beda, kemudian konsep berfikir yang berbeda turut menjadi sedikit hambatan karena dilatarbelakangi pendidikan yang berbeda, namun meski begitu setiap proses implementasi program yang beliau ketahui selalu tuntas terlaksana.

Hal senada juga disampaikan Bapak Darwin, menurut beliau yang menjadi hambatan terbesar masyarakat dalam proses implementasi program adalah kesibukan setiap masyarakat yang berbeda dikarenakan pekerjaannya masing masing, kemudian minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah Desa sehingga masyarakat kurang mengetahui apa saja program yang ada.

Begitupun dengan Bapak Albert Prawira Utama SP, menurut beliau dikarenakan keterbatasan waktu yang dimiliki masyarakat sehingga menjadi hambatan masyarakat untuk turut langsung berpartisipasi disetiap kegiatan Desa.

Sementara menurut Ibu Helmalia sari bahwa untuk kelompok ibu ibu yang ada didusun mereka tidak ada hambatan yang berarti dalam proses implementasi program, setiap kegiatan disesuaikan dengan kesibukan para ibu ibu.

Kemudian menurut Bapak M Hutapea yang menjadi hambatan masyarakat dalam partisipasi setiap kegiatan adalah waktu dimana kegiatan berlangsung bersamaan dengan waktu kerja pada umumnya dalam hal ini senin hingga jumat, menurut beliau jika kegiatan turut dilaksanakan di akhir pekan ada kemungkinan partisipasi masyarakat meningkat.

Sementara hal berbeda disampaikan oleh Bapak Joko, menurut beliau minimnya sosialisasi pemerintah menjadi hambatan masyarakat untuk berpartisipasi disetiap kegiatan yang ada. Bahkan hingga dapat kepemimpinan

kepala Desa berakhir dirinya tidak pernah sama sekali mendapat sosialisasi dari pihak desa perihal alokasi dana Desa dan program yang ada.

Hal senada juga dikatakan Bapak Dedek Agung S.Sos bahwa minimnya sosialisasi pemerintah Desa menjadi hambatan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam setiap kegiatan Desa, jika ada sosialisasi artinya sosialisasi tersebut tidak menyentuh semua pihak. Tentunya keterhambatan tersebut berimbas pada proses implementasi

e. Sosialisasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sumiyati selaku Plt kepala Desa Ledong Timur, beliau mengatakan bahwa pemerintah Desa selalu berupaya transparan dalam setiap sosialisasi anggaran dengan melibatkan setiap unsur masyarakat, kepala dusun, tokoh masyarakat dan sebagainya. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan Desa yang bersih. Dalam proses sosialisasinya pemerintah Desa berkoordinasi dengan kepala dusun untuk mensosialisasikan anggaran Desa, kemudian masyarakat turut diundang untuk melakukan musyawarah Desa dalam penentuan program apa saja yang akan dilaksanakan pemerintah Desa satu tahun kedepan.

Hal senada juga dikatakan Ibu Rusdiah selaku pendamping Desa, bahwa pemerintah Desa selalu mensosialisasikan setiap anggaran Desa yang masuk dengan masyarakat. Masyarakat juga turut dilibatkan dalam setiap perencanaan program melalui musyawarah Desa, beliau juga tidak menafikan bahwa adanya keluhan masyarakat yang tidak mendapat sosialisasi dari pemerintah Desa, dan memberi informasi dan sosialisasi kepada masyarakat tersebut.

Begitupun dengan Bapak Dedek Agung S.Sos yang tidak mendapat sosialisasi dari pemerintah Desa perihal alokasi dana Desa dan perencanaan program Desa. Beliau tidak pernah mendapati sama sekali pemerintah Desa melakukan sosialisasi ke rumah beliau maupun tetangga tetangga lainnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Joko, beliau mengatakan bahwa dirinya tidak mendapat sosialisasi dari pihak Desa, namun beliau meyakini pasti ada sosialisasi dari pemerintah Desa akan tetapi mungkin hanya keterwakilan beberapa masyarakat saja.

Sementara itu menurut bapak M Hutapea pemerintah Desa Ledong Timur turut mensosialisasikan alokasi dana Desa yang masuk ke Desa, pemerintah Desa melalui kepala dusun beberapa kali melakukan sosialisasi perihal program yang akan dilaksanakan begitupun dengan rencana penetapan program yang dijalankan, beliau juga mengatakan bahwa kepala Desa beberapa kali turut menyampaikan program program Desa yang akan dijalankan disetiap kesempatan maupun perkumpulan.s

Hal senada juga disampaikan Ibu Helmalia Sari, menurut beliau sejauh ini pemerintah Desa Ledong Timur mensosialisasikan dengan baik hingga beberapa kali dimulai dari sosialisasi perencanaan program hingga sosialisasi program program apa saja yang akan dilaksanakan untuk masyarakat.

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Bapak Albert Prawira utama SP,dirinya mendapat sosialisasi langsung oleh kepala Desa Ledong Timur perihal adanya alokasi dana Desa, kepala Desa juga mengajak dirinya dan tetangga lain untuk hadir mengikuti musyawarah Desa untuk perencanaan program apa saja

yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa satu tahun kedepan. Menurut Bapak Albert sosialisasi dilakukan setiap tahunnya dengan proses yang sama.

Sementara itu menurut Bapak Darwin pemerintah Desa Ledong Timur turut mensosialisasikan program pengembangan masyarakat ke dirinya dan beberapa tetangga, meski hanya beberapa perwakilan saja yang mendapat sosialisasi tersebut.

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Hanafi Habib SPd, bahwa sejauh yang beliau perhatikan pemerintah Desa mensosialisasikan program program yang menyangkut pengembangan masyarakat sesuai dengan porsinya, sebagai contoh di sebuah dusun ada pelatihan budidaya ikan dan bantuan kepada kelompok masyarakat tertentu, jauh hari sebelum proses implementasi program, pemerintah Desa terlebih dahulu melakukan observasi ke dusun tersebut dan berbincang dengan warga mengenai perekonomian mereka, lalu saat akan ada musyawarah Desa, pemerintah Desa datang mensosialisasikan perihal alokasi dana Desa dan mengajak masyarakat untuk bersama sama menentukan program yang akan dijalankan didusun tersebut.

Sementara menurut Bapak Lot Marsius Siburian SP selaku ketua Bumdes, perihal sosialisasi alokasi dana Desa pihaknya selalu diberikan informasi mengenai program apa saja yang diberikan pihak Desa kepada pihak Bumdes sendiri. Begitupun saat proses perencanaan program saat musyawarah Desa, pihak Desa selalu meminta saran dari Bumdes untuk program kemasyarakatan dan program kemandirian.

f. Penyuluhan Program

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sumiyati selaku Plt Kepala Desa Ledong Timur, pihaknya beberapa kali melakukan penyuluhan kesehatan bekerjasama dengan pihak puskesmas kecamatan, kemudian penyuluhan tentang narkoba kepada pemuda dan remaja di aula Desa dan disekolah sekolah yang berada di Desa Ledong Timur, lalu terakhir ada penyuluhan di bidang pertanian, semua program tersebut terus berlanjut setiap tahunnya.

Hal senada juga dikatakan Ibu Rusdiah selaku pendamping Desa Ledong Timur bahwa proses penyuluhan program selalu diikuti dengan antusias oleh masyarakat dikarenakan mendapat pengetahuan baru disetiap penyuluhannya.

Menurut Bapak Lot Marsius Siburian selaku ketua Bumdes Ledong Timur, bentuk penyuluhan program yang dilaksanakan pemerintah Desa Ledong Timur yaitu dengan temu ramah atau musyawarah di Aula Desa.

Adapun menurut Bapak Hanafi Habib SPd, bentuk penyuluhan program pengembangan masyarakat sangat beragam yang telah dilakukan pemerintah Desa, mulai dari penyuluhan kerumah rumah, di warung kopi, di aula Desa. Menurut beliau hal tersebut cukup baik, karena masyarakat harus mendapat informasi apa saja tentang Desa Ledong Timur.

Sementara itu menurut Bapak Darwin bentuk penyuluhan program pengembangan masyarakat oleh Pemerintah Desa yaitu dengan koordinasi pihak Kepala dusun menginformasikan kepala warga disetiap dusun. Penyuluhannya cukup baik tapi tidak efektif karena tidak menyeluruh hanya perwakilan saja.

Hal senada juga disampaikan Bapak Albert Prawira Utama, bahwa bentuk penyuluhan program yang dilakukan oleh pemerintah Desa yaitu melalui kepala dusun yang menyampaikan kepada warga, kemudian warga dihimbau untuk mengikuti musyawarah Desa di aula Desa.

Adapun menurut Ibu Helmalia sari, bentuk penyuluhan program yang dilakukan sudah baik, beberapa program yang diberikan sangat bermanfaat seperti penyuluhan bahaya narkoba, kesehatan, dan bagi kami kaum ibu ibu berupa kursus menjahit dan bantuan mesin jahit dari piha Desa.

Sementara itu menurut Bapak M Hutapea adapun bentuk penyuluhan program yang dilakukan pemerintah Desa Ledong Timur berupa Penyuluhan ke rumah warga dan juga saat adanya perkumpulan warga, akan tetapi penyuluhannya tidak menyentuh seluruh pihak yang ada

Namun hal berbeda disampaikan oleh Bapak Dedek Agung S.Sos, menurut beliau penyuluhan yang dilakukan pemerintah Desa sangat buruk dikarenakan dirinya dan tetangganya tidak mendapat penyuluhan program sedikitpun selama ini.

Hal senada juga disampaikan Bapak Joko, beliau mengatakan bahwa pernah mendengar adanya Penyuluhan bahaya narkoba tetapi informasi tersebut setelah beberapa hari penyuluhan tersebut berlangsung, namun informasi tersebut diperoleh dari warga lain yang berbeda dusun tinggalnya dengan baik.

g. Berkelanjutan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sumiyati Plt Kepala Desa Ledong Timur, beliau mengatakan untuk anggaran tahun 2018 tidak ada program

pengembangan masyarakat untuk kelompok masyarakat yang dilanjutkan dari tahun sebelumnya, tetapi di anggaran tahun 2017 dan sebelumnya terdapat program yang berkelanjutan, contohnya budidaya ikan gurami dan lele, sebelumnya pemerintah Desa memberikan bibit ikan untuk di kelola oleh kelompok masyarakat di beberapa dusun, kemudian masyarakat di beri pengetahuan bagaimana membudidayakan sendiri hingga mengerti dan bibit serta ikan yg sudah besar dapat dijual. Namun karena menurut Pemerintah Desa masyarakat sudah faham dan dapat mengelola sendiri.

Hal senada juga dikatakan ibu Rusdiah selaku Pendamping Desa, Beliau mengatakan bahwa untuk program pengembangan masyarakat tahun 2018 tidak ada yang dilanjutkan, melainkan hanya dirubah dengan program lain, terkecuali program pembinaan masyarakat dan pemuda, program penambahan jenis makanan ke posyandu, pelatihan bagi perangkat Desa maupun program pembangunan infrastruktur semua berkelanjutan setiap tahunnya.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Lot Marsius Siburian, banyak program yang dilanjutkan oleh pemerintah Desa contohnya pembangunan infrastruktur, pengembangan masyarakat berupa pelatihan dan bantuan kepada kelompok tani, peningkatan kualitas Bumdes.

Sementara itu menurut Bapak Hanafi Habib, Pemerintah Desa melanjutkan program pengembangan budi daya ikan selama setahun setelah ditahun pertama cukup berhasil, namun tahun ini tidak dilanjutkan karena masyarakat telah mampu menswadayakannya sendiri, menurut beliau program budidaya ikan

seperti ini patut dilaksanakan juga di dusun lain karena turut membantu perekonomian warga.

Adapun hasil wawancara terhadap Bapak Darwin, beliau mengatakan banyak program yang pembangunan yang dilanjutkan pemerintah Desa, contohnya pembangunan drainase disetiap dusun. Namun untuk program pengembangan masyarakat beliau tidak terlalu mengetahui program apa saja yang dilanjutkan pemerintah Desa Ledong Timur, beliau berharap program yang dilanjutkan kiranya dapat membantu perekonomian warga.

Hal senada juga disampaikan Bapak M,Hutapea, menurutnya program pembangunan yang berkelanjutan yang dilaksanakan pemerintah Desa sangat baik karena percepatan pembangunan infrastruktur di Desa Ledong Timur sangat dibutuhkan untuk menunjang berbagai aktifitas warga dan kenyamanan warga, contohnya perbaikan drainase dan titi plat beton, kemudia pelatihan bagi kelompok ibu ibu, pelatihan bagi masyarakat petani.

Sementara itu menurut Ibu Helmalia Sari, program kursus menjahit yang mereka peroleh sangat baik dan pantas untuk dilanjutkan didusun lain, mengingat terbantunya perekonomian masyarakat dengan adanya program tersebut. Beliau mengatakan bahwa awalnya pemerintah Desa memberikan pelatihan, kemudian memberi bantuan berupa mesin jahit untuk kelompok ibu ibu dan hingga kini kelompok ibu ibu dapat mandiri dan membantu perekonomian keluarga.

Hal berbeda disampaikan oleh Bapak Albert Prawira Utama, beliau tidak mengetahui program apasaja yang berkelanjutan setiap tahun kecuali programpembangunan inrastruktur

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Joko yang tidak mengetahui apa saja program yang ada dan dilanjutkan setiap tahunnya oleh pemerintah Desa dikarenakan minimnya sosialisasi pihak Desa kepada beliau

Begitupun dengan Bapak Dedek Agung S.Sos, beliau juga tidak mengetahui program apa saja yang dilanjutkan pemerintah Desa secara terus menerus dikarenakan minimnya sosialisasi pemerintah Desa kepada beliau.

h. Partisipasi

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Ibu Sumiyati selaku Plt kepala Desa Ledong Timur, beliau mengatakan Masyarakat cukup aktif dalam penerapan program yang ada. Hanya saja tidak semua masyarakat bersedia mengikuti program dikarenakan beragamnya kesibukan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap ibu rusdiah selaku pendamping Desa, beliau mengatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa dalam mengikuti setiap kegiatan yang Desa laksanakan cukup tinggi meskipun ditengah berbagai kesibukan yang ada. Reaksi positif tersebut tentunya menunjang proses implemenasi program dan kesuksesan program yang dilaksanakan.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan terhadap ibu Helmalia sari, beliau mengatakan turut berpartisipasi dalam program pelatihan kursus menjahit dikarenakan dirinya sudah lama ingin belajar menjahit. Namun untuk program lainnya beliau tidak terlalu mengikuti karena kesibukannya sebagai ibu rumah tangga.

Sementara itu Bapak M Hutapea mengatakan bahwa dirinya tidak ikut dalam implementasi program, akan tetapi mengikuti jika ada musyawarah Desa

mengenai program apa saja yang akan dilaksanakan. Menurut beliau ketidaksertaan dirinya dalam proses implementasi karena dirinya sibuk berladang sehari harinya. Namun itupun beliau sering diminta nasihat dan masukan oleh kepala Desa untuk kemajuan Desa Ledong Timur.

Hal berbeda disampaikan oleh Bapak Darwin, beliau berkata bahwa dirinya tidak mengikuti program pengembangan masyarakat yang ada dikarenakan tidak mendapat informasi kapan program terlaksana, sementara saat musyawarah perencanaan program beliau mengikutinya.

Sementara itu disampaikan oleh Bapak Dedek Agung S.Sos, beliau mengatakan bahwa dirinya tidak turut berpartisipasi dalam setiap program dikarenakan tidak mendapat informasi kapan perencanaan program maupun proses implementasi program pengembangan masyarakat.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Joko, , beliau mengatakan bahwa dirinya tidak turut berpartisipasi dalam setiap program dikarenakan tidak mendapat informasi kapan perencanaan program maupun proses implementasi program pengembangan masyarakat.

Adapun hasil wawancara terhadap Bapak Albert Prawira Utama, beliau mengatakan tidak mengikuti setiap program yang ada dikarenakan kesibukannya sebagai karyawan swasta. Beliau juga mengatakan bahwa beberapa kali mendapat informasi mengenai perencanaan maupun implementasi, namun tidak pernah mengikuti sama sekali kegiatan tersebut, akan tetapi kepala Desa sangat baik dan selalu membangun komunikasi dengan para pemuda sembari meminta pendapat dan masukan untuk perkembangan Desa.

Sementara itu hasil wawancara dengan Bapak Lot Marsius Siburian, menurut beliau sejauh ini masyarakat cukup antusias dalam kegiatan yang ada, hal itu terlihat dalam musyawarah Desa dalam hal perencanaan program yang akan dilaksanakan setiap tahunnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Hanafi Habib SPd, bahwa dirinya dan warga dusun tempat ia tinggal sangat antusias dalam setiap kegiatan yang ada, hal ini dikarenakan program yang ditawarkan dan dilaksanakan cukup baik.

C. Pembahasan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dilapangan maka penyajian satu persatu tentang jawaban responden diperoleh rekapitulasi sebagai berikut :

Tujuan dari anggaran dana desa yakni untuk memperbaiki infrastruktur yang ada di Desa Ledong Timur seperti drainase, titi plat beton, renovasi gedung kantor dan aula serta pemberdayaan, pengembangan dan pembinaan masyarakat, adapun selain itu tujuan dari anggaran dana desa ialah untuk mengurangi keluarga miskin yang ada di Desa Ledong Timur. Artinya dana desa digunakan untuk pembangunan dan juga pemberdayaan demi kemajuan Desa Ledong Timur. Dalam hal ini pemerintah desa menggunakan anggaran dana desa untuk program pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia.

Sementara itu yang menjadi sasaran dari anggaran dana desa adalah untuk bidang pembangunan infrastruktur desa berupa sarana prasarana dan juga bidang pengembangan sumber daya manusia berupa pelatihan, penyuluhan maupun pengembangan kemampuan ketrampilan bagi masyarakat Desa Ledong Timur.

Program program yang ditawarkan oleh Pemerintah Desa Ledong Timur dari alokasi dana desa yakni meliputi perbaikan drainase, pembangunan titi plat beton, rehab gedung aula dan kantor desa, ada juga program pembinaan kelompok pemuda, serta pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu ada program peningkatan kapasitas perangkat desa juga selalu dilaksanakan setiap tahunnya, serta pelatihan terhadap Bumdes.

Program program yang dilaksanakan sudah berjalan efektif atau tepat guna. Hal ini ditandai dengan semua program yang ada sesuai dengan keinginan masyarakat berdasarkan musyawarah desa. Masyarakat meminta agar perbaikan drainase dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kemungkinan banjir apabila curah hujan cukup tinggi. Selain itu ada juga program yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat seperti bantuan yang diberikan pemerintah desa berupa bantuan modal usaha melalui Bumdes, bantuan hewan ternak, bantuan mesin jahit kepada kelompok ibu ibu, bantuan bibit ikan dan budidaya ikan.

Sejauh ini program yang telah dijalankan oleh pemerintah desa dalam pelaksanaannya sudah tepat waktu, mulai dari proses perencanaan program sampai pada tahap pelaksanaannya. Pemerintah desa cukup berhasil menyesuaikan pelaksanaan program sesuai dengan anggaran yang proses pencairannya bertahap.

Pemerintah Desa Ledong Timur sejauh ini tidak mendapati hambatan yang berarti dalam menjalankan setiap program meskipun proses penerimaan dana desa bergelombang, pemerintah desa berhasil mengantisipasinya dengan menyusun program perencanaan pembangunan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan dan

jadwal penerimaan anggaran. Hal tersebut cukup positif sehingga tidak memperlambat proses implementasi program baik infrastruktur maupun pengembangan masyarakat.

Sementara itu dari pihak masyarakat yang menjadi hambatan untuk terlibat dalam program pemerintah desa yaitu kesibukan aktivitas masyarakat desa yang bekerja sehari harinya, kemudian minimnya informasi dari perangkat desa terhadap kelompok masyarakat di dusun tertentu.

Sejauh ini setiap anggaran dana yang masuk disosialisasikan kepada masyarakat secara transparan. Artinya masyarakat mengetahui dana yang masuk berapa untuk kebutuhan desa selama satu tahun kedepan. Dalam proses sosialisasinya pemerintah desa mengajak masyarakat untuk ikut dalam musyawarah desa dalam rangka merencanakan dan ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan program pemerintah desa. Adapun beberapa kelompok masyarakat tidak mendapat sosialisasi dari perangkat desa dikarenakan sosialisasi bersifat keterwakilan dari kepala dusun, tokoh masyarakat maupun tokoh agama.

Penyuluhan program yang diberikan pemerintah desa berkaitan dengan penyuluhan pertanian, kesehatan, bahaya narkoba maupun keterampilan untuk ibu-ibu. Penyuluhan dilaksanakan di gedung aula Desa Ledong Timur dan di sambut antusias oleh masyarakat. Penyuluhan juga dilaksanakan ke sekolah-sekolah dasar yang ada di Desa Ledong Timur tentang bahaya narkoba agar generasi muda tidak terjerumus untuk memakai narkoba, kegiatan ini setiap tahunnya berlangsung di Desa Ledong Timur.

Pemerintah Desa Ledong Timur selalu berupaya untuk melanjutkan berbagai program yang baik, seperti pembangunan infrastruktur dan juga pengembangan serta pembinaan masyarakat setiap tahunnya. Adapun pertimbangan melanjutkan berbagai program melalui masukan dari masyarakat saat musyawarah desa.

Beberapa masyarakat yang telah menerima manfaat program juga turut memberikan masukan kepada pemerintah desa untuk melanjutkan program kepada masyarakat desa di dusun lainnya seperti bantuan bibit ikan serta pelatihan budidaya ikan, kemudian kursus menjahit kelompok ibu ibu serta bantuan mesin jahit dan pemberian hewan ternak.

Tingkat partisipasi masyarakat juga menjadi indikator keberhasilan pemerintah desa dalam menjalankan setiap program yang ada. Pemerintah selalu berupaya mengajak masyarakat berpartisipasi dalam setiap kegiatan dengan melakukan sosialisasi terhadap kelompok warga berkoordinasi dengan kepala dusun, namun mengingat setiap warga memiliki kesibukan yang berbeda tentunya partisipasi sedikit berkurang. Tapi tetap tidak menyurutkan antusiasme masyarakat yang telah berpartisipasi disetiap program yang telah di ikutinya.

Sementara itu terdapat beberapa kelompok masyarakat yang tidak mendapat informasi mengenai perencanaan alokasi dana desa dan implementasi program, mereka mengaku tidak pernah mendapat informasi mungkin dikarenakan pihak desa hanya memberi informasi berdasarkan keterwakilan saja.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Setelah melakukan penelitian lapangan dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan dan sasaran sudah tepat karena masyarakat turut dilibatkan dalam setiap aktifitas penggunaan Anggaran Dana Desa
2. Program berjalan sesuai dengan prosedur yang ada dan program dijalankan secara sistematis. Hal ini ditandai dengan adanya program program yang ditawarkan oleh pemerintah Desa Ledong Timur dari alokasi dana desa yakni meliputi pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pembangunan dan rehab gedung kantor kepala desa dan aula desa, perbaikan drainase, pembuatan titi beton, serta program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat seperti kegiatan pendidikan pelatihan bagi kepala desa dan perangkat desa, pelatihan bagi Bumdes, kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat, kelompok pemuda, dan kelompok ibu rumah tangga.
3. Adanya kerjasama dalam penyelenggaraan program pembangunan infrastruktur dan pengembangan masyarakat antara pemerintah desa dan masyarakat sudah berjalan sehingga program program tersebut dapat berjalan. Dilihat dari banyaknya pembangunan sarana dan prasarana desa

yang telah dibangun maka sejauh ini program program tersebut sudah berjalan efektif dan efisien.

4. Tidak ada hambatan berarti yang dialami oleh pemerintah Desa Ledong Timur dalam proses implementasi program meskipun sistem pencairan dana secara bertahap, hal tersebut dapat disesuaikan dengan rencana program yang dijadwalkan sesuai anggaran yang ada disetiap tahapannya.
5. Pemerintah melakukan proses sosialisasi kepada masyarakat meski tidak menyeluruh. Adapun sosialisasi dilakukan guna menarik partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang ada baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik.
6. Setiap program yang dijalankan oleh pemerintah desa melalui tahap penyuluhan yang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan yang bersumber dari anggaran dana desa.
7. Program yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa diimplementasikan secara berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan pembangunan infrastruktur dan pengembangan masyarakat maupun pembinaan kelompok masyarakat dan pemuda serta pelatihan Kepala desa, perangkat desa dan pengurus Bumdes.
8. Partisipasi masyarakat dalam proses implementasi program bergantung pada proses sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa, kesibukan masyarakat yang beragam, serta pemilihan waktu yang tepat untuk melaksanakan setiap program yang melibatkan kehadiran masyarakat.

Dari delapan kategorisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi Anggaran Dana Desa terhadap pengembangan masyarakat di Desa Ledong Timur Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan telah berjalan cukup baik sesuai dengan prosedur yang ada. Adapun yang menjadi perhatian khusus adalah tingkat partisipasi masyarakat yang seharusnya dapat lebih tinggi jika pemerintah desa semakin giat dalam mensosialisasikan program program ke masyarakat.

B. SARAN

Setelah melalui pembahasan dan menarik kesimpulan, maka beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan penyaluran Anggaran Dana Desa untuk pembangunan dan pengembangan sumber daya masyarakat perlu dilanjutkan untuk mengoptimalkan pembangunan desa dan kemandirian masyarakat
2. Disarankan optimalisasi penggunaan anggaran dana desa difokuskan untuk pemberdayaan dan pengembangan masyarakat guna meningkatkan kualitas masyarakat, menciptakan masyarakat yang mandiri, serta meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat agar terciptanya Desa Ledong Timur yang bermartabat.
3. Disarankan agar transparansi dalam menggunakan anggaran pendapatan dan belanja desa, informasi penggunaan anggaran harus detail agar masyarakat mengetahui anggaran pengembangan masyarakat digunakan untuk program apa saja, anggaran pembinaan masyarakat digunakan untuk program apa saja dan lain sebagainya. Bila perlu disetiap dusun dibuat

papan informasi atau baliho yang berkaitan dengan anggaran Desa, program Desa serta waktu pelaksanaan program.

4. Diharapkan pemerintah desa dapat menghidupkan kembali siskamling di Ledong Timur, bila perlu membangun poskamling disetiap dusun dengan anggaran dana desa yang tersedia agar siskamling kembali hidup dan tingkat keamanan semakin tinggi di Desa Ledong Timur.
5. Diharapkan pemerintah desa menjalankan kegiatan olahraga dan kepemudaan melalui anggaran dana desa setiap tahunnya.
6. Diharapkan pemerintah desa dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, terutama dalam pengurusan administrasi kependudukan dan sebagainya.
7. Disarankan pemerintah desa membangun perpustakaan desa di Ledong Timur, karena kantor kepala desa tidak ada perpustakaannya, hendaknya kantor desa dijadikan wadah bersilaturahmi antara warga, pemuda, dan remaja. Bukan sekedar tempat pengurusan administrasi saja.
8. Diharapkan perlu adanya peningkatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui apa saja program pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Zainal, 2012. *Kebijakan Publik*. Salemba Humanika : Jakarta
- Adi, Isbandi Rukminto, 2008. *Intervensi komunitas ; pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Afandi, Agus dkk, 2013. *Modul Participatory Action Research*. CV Dwiputra Pustaka Jaya : Sidoarjo
- Agustino Leo, 2016. *Dasar - Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta : Bandung
- Anggara Sahya, 2014. *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia : Bandung
- Aziz, Ali, 2009. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pesantren : Yogyakarta
- Dumasari, 2014. *Dinamika Pengembangan Masyarakat Partisipatif* , Pustaka Pelajar : Yogyakarta)
- Dwiningrum, Siti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Mardikanto. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta : Bandung
- Moleong. J. Lexy, 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT Elexmedia Komputindo. Jakarta
- Nurdin. 2002. *Konteks Implimentasi berbasis kurikulum*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Balai Pustaka: Jakarta
- Soetomo. 2008. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta : Bandung

Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Membangun Rakyat*. Rafika Aditama: Bandung

Tonny, Fredian. 2014. *Pengembangan Masyarakat*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia : Jakarta

Usman, Sunyoto. 2012. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta

Usman, Purnomo. 2009. *Metodologi penelitian sosial*. Bumi Aksara : Jakarta

Zubaedi, 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif* . Ar-Ruzz Media Group: Yogyakarta

Sumber Perundang-undangan :

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Desa

Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ledong Timur

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. IDENTITAS

Nama : AHMAD MAHERDIKA HASIBUAN
Tempat/Tanggal Lahir : AEKKANOPAN, 01 AGUSTUS 1995
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Alamat : JL. SUKARAMAI LK. V AEKKANOPAN
Jurusan : ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
Agama : ISLAM
Warga Negara : INDONESIA
Anak Ke ; 1 (Satu)

2. NAMA ORANG TUA

Ayah : AHMAD SYAHRUDDIN HASIBUAN
Ibu : HERLINA TAMBUNAN

3. PENDIDIKAN

- a. SD Negeri 010120 Ledong Timur Asahan Tahun 1997, Berijazah
- b. SMP Swasta Sultan Hasanuddin Aekkanopan Tahun 2010, Berijazah
- c. SMK Swasta Muhammadiyah 3 Aekkanopan Tahun 2013, Berijazah
- d. Terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Tahun 2014 sampai sekarang

Demikian daftar riwayat hidup ini diperbuat dengan sebenarnya.

Penulis

Ahmad Maherdika Hasibuan